c
815
N+

Seri Informasi Aceh No. 5

ACEH DAN PEPERANGAN DENGAN JEPANG

Bab I

Karangan
DR. A.J. PIEKAAR

Diterjemahkan oleh : Aboe Bakar
Judul Asli : ATJEH EN DE OORLOG MET JAPAN

Editor : IBRAHIM ALFIAN

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH
BANDA ACEH
1977

861 636 104

C-815-N+

Seri Informasi Aceh No. 5

ACEH DAN PEPERANGAN DENGAN JEPANG

Bab I

Karangan
DR. A.J. PIEKAAR

Diterjemahkan oleh : Aboe Bakar
Judul Asli : ATJEH EN DE OORLOG MET JAPAN

Editor : IBRAHIM ALFIAN

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH
BANDA ACEH
1977

KONINKLIJK INSTITUUT
903385
VOOR
28-11-1990
TAAL-, LAND- en VOLKENKUNDE

KONINKLIJK INSTITUUT
voor
TAAL-, LAND- en VOLKENKUNDE

Kata Pengantar

Bab I buku Atjeh en de Oorlog met Japan karya Dr. A.J. Piekaar, bekas Sekretaris keresidenan Aceh dan daerah takluknya, yang terjemahannya kami sajikan ini tidak dimaksudkan bagi kepentingan mereka yang sedang belajar di A.P.D.N. Aceh yang memang berkewajiban memahami susunan serta keadaan pemerintah di Aceh pada masa yang lampau, akan tetapi juga sangat besar manfaatnya bagi para pejabat sipil dan militer yang bertugas di Aceh serta kalangan yang berminat lainnya.

Semoga para pembaca dapat memetik butir-butir yang berguna dalam karya ini.

BANDA ACEH, 1 September 1977

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI
ACEH, UNIVERSITAS SYIAH KUALA.-

(Ibrahim Alfian)
Direktur

= FIA/pur =

B A B I. (+)

ACEH SEBELUM PEPERANGAN DENGAN JEPANG.

§ 1. Keadaan politik umum.

Untuk memperoleh suatu gambaran yang sesungguhnya mengenai jalannya peristiwa-peristiwa di Aceh pada saat-saat penyerbuan dan pendudukan Jepang, maka mula-mula perlulah diberikan suatu gambaran tentang keadaan di Aceh mengenai politik, ekonomi dan kebudayaan pada masa-masa sebelum pecah peperangan dengan Jepang. Di dalam bab ini saya akan berusaha melukiskan gambaran tersebut dalam garis besarnya saja.

Keadaan politik di Aceh selama tahun-tahun terakhir sebelum pecahnya peperangan tidak lain dapat dikatakan menguntungkan dan menampakkan gejala, bahwa pada akhirnya telah tiba saatnya bagi rakyat Aceh untuk bekerjasama dalam banyak hal bagi pembangunan negeri dalam waktu yang cepat. Kelihatannya ialah, bahwa rakyat pada akhirnya telah menyerah secara definitif kepada kekuasaan pemerintah Belanda dan menyadari, bahwa tidak ada jalan lain yang masih terbuka kecuali bekerjasama dengannya. Malahan terdapat kesan, bahwa di kalangan lapisan-lapisan luas, rakyat telah menghargai usaha keamanan dan tatatertib, kepastian hukum serta kemajuan ekonomi dan kebudayaan yang dibawakan oleh pemerintah Belanda.

Aksi-aksi pemberontakan yang tiap-tia kali berkobar kembali sesudah selesainya peperangan Belanda di Aceh, a.l. yang sangat serieus adalah pemberontakan Bakôngan (1925-1927) dan yang terakhir tetapi penting artinya adalah aksi di Lhông (1933), kini telah dapat dipadamkan. Peristiwa-peristiwa yang dinamakan "Pembunuhan Aceh", y.i. suatu bentuk khusus dalam menyalurkan kesulitan-kesulitan batin yang ditempuh oleh orang-orang Aceh, kini hampir tidak disebut-sebut lagi. Oleh karena antara pembunuhan-pembunuhan tersebut dengan perasaan benci orang-orang Aceh terhadap orang-orang kafir (bhs. Aceh: kaphé) terdapat suatu hu-

---

(+) Paragrap 1, 6 dan 7 diterjemahkan oleh Drs. Teuku Ibrahim Alfian, M.A.

=bungan=

bungan yang erat sekali, maka pengurangan-pengurangan tersebut dapatlah dipandang sebagai suatu pertanda yang menguntungkan, karena menunjukkan adanya pengurangan rasa benci yang hebat. Pelaku pembunuhan itu mencari suatu jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya melalui kematian dengan cara melakukan serangan atas seorang kafir dengan anggapan, bahwa dengan tindakannya itu - menurut keyakinannya - ia telah mendapat jaminan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sorga.(+) Sifat keras dan fanatik kepada agama yang terdapat pada orang Aceh rupa-rupanya telah memberi tempat bagi suatu orientasi agama yang lebih bersifat membangun dan dengan jalan mengadakan perluasan dan penyempurnaan pendidikan agama diharapkan dapat dilakukan pemurnian dan memperdalam kehidupan beriman. Ta' ada seorang pun terpikir akan bahaya serieus dari pihak sisa-sisa tokoh-tokoh pemimpin perjuangan terakhir yang hampir-hampir bersifat dongeng itu. Aliran-aliran politik nasional yang modern hampir tidak berpengaruh pada rakyat Aceh.

Jadi tidaklah mengherankan, bahwa di bawah pemerintahan residen Jongejans dalam tahun 1936, setelah bermusjawarat dengan instansi-instansi militer yang bersangkutan, telah dimulai mengadakan perobahan susunan pemerintahan di dalam sejumlah kewedanaan yang komandan militernya masih bertindak sebagai pejabat Kontelir untuk melaksanakan pemerintahan sipil. Suatu gabungan kekuasaan militer dan sipil dalam satu tangan dianggap tidak perlu lagi dan bagi pelaksanaan pemerintahan yang normal dapat diserahkan kepada pejabat-pejabat Pemerintahan Dalam Negeri. Penggantian tersebut secara berturut-turut telah terjadi dalam tahun 1938 yang disusul di tahun-tahun berikutnya di dalam kewedanaan Lam Meulo, Kuta Canè, Tapa' Tuan, Blang Kejerèn dan Meulabôh, sehingga hanya di dalam kewedanaan-kewedanaan dalam kenegerian bahagian Selatan daerah Aceh saja yang merupakan medan pertarungan-Bakôngan, masih terdapat komandan militer yang tetap diserahi tanggungjawab

---

=pemerintahan=

(+) Untuk keterangan-keterangan khusus yang lebih mendalam saya menunjuk kepada bab yang bersangkutan dalam karangan residen Jongejans, "Land en volk van Atjeh, vroeger en nu" (=negeri dan rakyat Aceh, dahulu dan sekarang), 1939, halaman 316 dst.

P.

pemerintahan sipil. Juga telah diputuskan untuk mengurangi secara bertahap jaringan garnisun-garnisun infanteri dan marsosé yang terdapat di Aceh; yang pertama-tama dihapuskan ialah garnisun Padang Tiji dalam kewedanaan Seulimeum dan di Singkel.

Semua tindakan tersebut sedikitpun tidak menimbulkan reaksi dari pihak rakyat. Tugas angkatan bersenjata di Aceh tampaknya sudah berakhir; saatnya sudah tiba untuk menggabungkan kembali pasukan-pasukan tersebut secara bertahap ke dalam aparat pertahanan Hindia-Belanda dalam menghadapi kemungkinan adanya agressi dari luar negeri yang selama bertahun-tahun telah dibebaskan dari tugas-tugas tersebut karena melaksanakan tugas-tugas pasifikasi di Aceh. Pengurangan garnisun-garnisun itu telah semakin dipercepat setelah pecahnya peperangan dengan Jerman dan bersamaan dengan itu telah dihapuskan pula garnisun-garnisun di Meureudu, Samalanga (kewedanaan Bireuen), Panton Labu dan Paya Bakông (kewedanaan Lhô' Sukôn), Lam Sujèn (kewedanaan Kutaraja), Lam No (kewedanaan Calang), Lam ie (kewedanaan Meulabôh) dan Blang Pidie (kewedanaan Tapa'Tuan). Usaha penghapusan susunan dan adanya kewaspadaan setempat serta pameran kekuatan yang dilakukan secara terus-menerus itu tidak sedikitpun pula menimbulkan reaksi yang langsung di kalangan rakyat Aceh, bahkan rasa gelisahpun tidak terlihat. Hanya dari beberapa pernyataan yang terpisah-pisah lebih dapat dirasakan dari pada dibuktikan, bahwa penghapusan garnisun-garnisun tersebut pada beberapa orang tertentu telah menghidupkan kembali harapan mengenai kemungkinan akan berakhirnya kekuasaan Belanda dalam masa yang akan datang. Akan tetapi sedikitpun tidak terduga, bahwa dalam pada itu telah timbul ketegangan-ketegangan sementara yang bertumpuk-tumpuk yang dramanya akan terjadi beberapa bulan kemudian.

Tadinya dikandung maksud, bahwa, sejajar dengan usaha di atas, untuk menyerahkan tugas_tugas patroli angkatan bersenjata kepada polisi-lapangan, sehingga hanya pada beberapa tempat tertentu saja perlu dipertahankan garnisun-garnisun militer. Akan tetapi aparat polisi-lapangan ternyata sama sekali belum dapat diperhitungkan untuk keperluan ini. Formasi polisi-lapangan telah diperkecil pada waktu diadakannya penghematan di tahun 1934,

sehingga tinggal satu detasemen di Kwala Simpang. Di samping itu dalam beberapa kewedanaan, pasukan infanteri dan marsosé masih juga dibebankan dengan tugas-tugas polisi-lapangan dan untuk itu di Kutaraja terdapat satu brigade, di Sabang dua, di Idi satu dan di Sinabang satu. Aceh hanya mempunyai kesatuan polisi-kota di Kutaraja, Sabang dan Langsa. Sejak tahun 1937 telah diajukan usul-usul guna pembangunan kembali aparat polisi-lapangan. Situasi keuangan yang sulit itu telah menyebabkan rencana t-ersebut berulang kali ditangguhkan. Barulah dalam tahun-tahun 1940/1941, sesudah pecah peperangan di Eropah dan adanya ancaman peperangan dengan Jepang, yang memerlukan suatu konsentrasi yang sekuat mungkin dari semua bagian-bagian angkatan bersenjata yang ada, maka dalam Anggaran Negara tahun 1942 diperoleh kredit-kredit permulaan untuk memulai perbaikan kembali secara bertahap aparat polisi-lapangan itu. Namun pecahnya peperangan dengan Jepang telah menghalangi pula pelaksanaan yang sesungguhnya persiapan-persiapan yang telah disediakan kredit-kreditnya itu.

Semua tindakan itu membuktikan adanya kepercayaan di pihak instansi-instansi militer dan sipil tertinggi terhadap perkembangan politik di Aceh. Sebab semakin lama semakin jelas terlihat perobahan sikap rakyat ke arah yang baik. Langkah-langkah pertama supaya rakyat 'menerima' - mungkin lebih tepat untuk mengatakan '[illegible]' - kepada hal-hal yang dibawakan oleh pemerintah Belanda, sudah diarahkan. Pada akhirnya rakyat tampaknya sudah melepaskan kedjasaan anti-Belanda mereka yang bersejarah dan terkenal itu. Malahan suatu awal kepercayaan dan pengharapan rupa-rupanya sudah tampak tumbuh. Setelah peperangan yang berjalan sedemikian lamanya itu, yang diperjuangkan sedemikian dahsyatnya dan menyedihkan dengan segala akibatnya bagi kepentingan masyarakatnya seperti yang dihasilkan oleh Peperangan Belanda di Aceh itu, maka pada akhirnya diperlukan berpuluh-puluh tahun pula untuk memungkinkan rakyat dapat menerima keadaan baru. Bertahun-tahun lagi akan dilalui sebelum rakyat daerah itu mencapai batas-batas kemungkinannya. Bagi suatu daerah seperti halnya Aceh, adanya kewaspadaan di bidang militer itu dapat mempercepat kepercayaan rakyat kepada kekuasaan asing, akan tetapi sebaliknya ia

=memperlambat=

memperlambat penghapusan rintangan prasangka pada kedua belah pihak dalam menegakkan maksud-maksud jujur terhadap satu dan lainnya.

---

§ 2. Kebijaksanaan pemerintah dan masälah-masälah pemerintahan.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di kepulauan Nusantara, di daerah Acehpun kebijaksanaan pemerintah dijalankan dengan perantaraan aparat-aparat pemerintahan adat yang telah terbentuk secara historis itu.

Di dalam aparat pemerintahan itu, daerah ulèebalang yang dikepalai oleh seorang ulèebalang (harfiah: panglima tentara(+)) secara turun-temurun, merupakan kesatuan territorial yang paling tinggi. Kendatipun para ulèebalang secara nominal dahulu merupakan "bawahan" sultan yang telah memberikan kepada mereka surat-surat pengangkatan ("sarakata") yang dibubuhi cab sikureueng (=cap sembilan), namun ulèebalang-ulèebalang yang turun-temurun itulah yang menjadi "kepala negeri yang sesungguhnya", seperti dinyatakan oleh Dr. C. Snouck Hurgronje (dalam bukunya "De Atjèhers", jilid I, 1893, halaman 91 (++)). Namun tidak pula semua ulèebalang itu merasa sanggup untuk membayar biaya-biaya guna mendapatkan "sarakata" itu, sedang yang lebih penting dari cab sikureueng itu adalah cab limong (=cap lima) yang dianggap merupakan lambang kekuasaan.

=Jika=

(+) Tidak di mana-mana dalam daerah Aceh di masa dahulu kepala-kepala rakyat itu dinyatakan sebagai "ulèebalang". Namun dalam sebutan jabatan di masa-masa belakangan, gelar tersebut berlaku di seluruh daerah Aceh.

P.

(++) Dr. C. Snouck Hurgronje menulis: "Para ulèebalang - seperti telah berulang kali kami katakan - adalah tuan-tuan negeri, kepala-kepala daerah yang po'ta;"

A.B.

Jika para sultan dan anggota-anggota keluarga laki-laki-nya menggunakan sebutan"tuanku", maka anggota-anggota keluarga para ulèebalang dan begitu juga kepala-kepala bawahannya yang a-kan kita bicarakan sebentar ini, menggunakan gelar-bangsawan "teuku".

Di samping gelar keduniaan itu, di daerah Aceh dikenal juga gelar "teungku" yang secara umum dipergunakan oleh semua orang - baik laki-laki maupun wanita - yang menjabat pekerjaan yang berhubungan dengan agama, atau oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam di bidang keagamaan atau yang di-anggap ta'at mengerjakan ketentuan-ketentuan agama di antara rak-yat umum. (+)

Daerah ulèebalang itu terbagi dalam sejumlah mukim yang dikepalai oleh seorang imeum (++). Setiap mukim terdiri pula da-ri sejumlah gampông (=kampung) atau meunasah (=tempat mengerjakan ibadat secara bersama di kampung) yang dikepalai oleh seorang keuchi' (=kepala kampung).

Tidak di seluruh daerah Aceh orang mengenal susunan ini. Dalam beberapa wilayah - seperti akan dapat dilihat di muka ini - ditemukan dalam daerah-daerah ulèebalang semacam susunan yang di-sebut ulèebalang-cut (=hulubalang kecil), ulèebalang-lapan (=hu-lubalang delapan), ulèebalang-peuet (=hulubalang empat) dsb. dan masing-masingnya itu biasanya terbagi pula dalam kesatuan-kesatu-an yang lebih kecil lagi yang terdiri dari beberapa buah kampung.

=Sejak=

(+) Karena pandangan hidupnya yang religieus yang telah tertanam pada bangsa Aceh sejak berabad-abad lamanya, maka gelar teungku dianggap gelar yang lebih mulia baginya. Tidak sedikit tokoh-tokoh golongan bangsawan Aceh yang bergelar teuku lebih suka disebut atau menggunakan gelar teungku bagi dirinya, seperti a.l. Teungku Haji Abdurrahman Keureukôn Katibônmulô' (bhs.Ar. Katib al mulk) Sri Indramuda (Teuku Keureukôn Lam Teungoh) (=Sekretaris kerajaan).

A.B.

(++) Baik penamaan daerah maupun nama pejabat dalam susunan ter-sebut menunjukkan berasal dari istilah keagamaan. Mukim pada mula-nya berarti di daerah Aceh "kelompok Jum'at", yakni daerah yang dicakup oleh sebuah mesjid untuk melakukan salat Jum'at. Kata itu diturunkan dari bhs. Arab muqim (=penduduk tetap setempat); di tempat itu harus terdapat sekurang-kurangnya 40 orang supaya salat Jum'at dapat dianggap sah.

=(Keterangan= P.

Sejak beberapa abad yang lalu dalam daerah Aceh Besar, daerah-daerah ulèebalang itu sudah tergabung ke dalam tiga buah federasi yang dinamakan sagoe (=sagi) dan dikepalai oleh seorang panglima sagoe (=Panglima sagi) secara turun-temurun (+). Di luar federasi itu, di samping daerah-daerah ulèebalang, terdapat pula apa yang dinamakan "mukim-mukim yang berpemerintahan sendiri" (bhs.Bld. "zelfstandige mukim") yang imeum-imeumnya tidak tunduk di bawah ulèebalang dan sama derajatnya dengan seorang ulèebalang. Di masa-masa dahulupun orang telah mengenal daerah-daerah persekutuan politik demikian di luar daerah Aceh Besar.

Di daerah-daerah yang didiami oleh orang-orang Gayo dan Alas (wilayah Gayo Luös dan Tanah Alas, Takèngon dan kenegerian Serböjadi dalam wilayah Langsa) yang di masa peralihannya dari masyarakat genealogis ke territorial belum begitu maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang didiami oleh orang-orang Aceh asli, terdapat susunan pemerintahan yang lain pula yang ta' perlu kita mendalaminya di sini. Begitu pula halnya mengenai susunan pemerintahan "Melayu" yang berada di daerah-daerah pasisir di bahagian Aceh Barat (++) dan dalam wilayah-wilayah Temiang, Singkel dan Simalur dengan penduduknya yang bukan Aceh asli.

=Berhubung=

(Dari sebelah: (Keterangan ini adalah menurut pengertian "lama". Hadis yang diriwayatkan oleh Daraquthni mengenai hal ini oleh imam Ahmad dikatakan "dusta dan palsu", lihat buku "Pengajaran Shalat", karangan A. Hassan, 1973, cetakan ke 15, hal. 271.)

A.B.

Imeum (bhs.Ar. "imam") sebenarnya berarti: seorang yang berdiri di muka pada waktu pelaksanaan salat. Oleh karena itu pada mulanya mukim itu terdiri dari sejumlah kampung dengan sebuah mesjid tempat melakukan salat Jum'at. Nama sesuatu daerah ulèebalang biasanya digelarkan menurut jumlah mukim-mukim itu kendatipun jumlahnya dapat berobah dalam suatu masa, ump. VII mukim Ba'ét.

P.

(+) Bahasa Aceh sagoe berarti sudut atau segi, yakni tamsil dari ketiga propinsi daerah Aceh-inti dengan segi-seginya yang menyerupai sebuah segi-tiga. Panglima berarti kepala atau pemimpin peperangan, yang menunjukkan, bahwa persekutuan tsb. bersifat ketentaraan. Ketiga sagi itupun dinyatakan dengan jumlah mukim yang telah tersusun sejak semula, seperti Sagi XXVI, XXV dan XXI mukim.

P.

(++) Daerah Aceh Barat yang disebut di dalam uraian ini terdiri dari wilayah-wilayah Calang, Meulaboh, Simeulu, Tapa'Tuan, kenegerian2 bahagian Selatan Aceh dan Singkel (dahulu) atau merupakan daerah2 kebupatian Aceh Barat dan Aceh Selatan sekarang.

A.B.

Berhubung kesultanan Aceh telah gugur oleh peperangan di Aceh, maka untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah Aceh terpaksalah dihubungi "wakil-wakil raja", ya'ni para ulèebalang yang - seperti dapat diketahui - sebenarnya berkedudukan "merdeka".

Dalam susunan pemerintahan Belanda, aparat-aparat pemerintahan adat ini diakui dalam bentuk daerah-daerah ulèebalang atau kenegerian yang berpemerintahan-sendiri (bhs. Bld. "zelfbesturende landschappen), kecuali dalam daerah Aceh Besar dan wilayah Singkel yang dimasukkan ke dalam "daerah yang diperintah langsung" (bhs. Bld. "rechtstreeks bestuurd gebied").

Kepala-kepala daerah yang menjadi bawahan sultan di dalam daerah Aceh Besar, yakni daerah yang mencakup ketiga sagi, berbeda halnya dengan di daerah-daerah lain dalam daerah Aceh, setelah masa penaklukannya itu - keliru- dianggap berkedudukan "merdeka". Begitu juga halnya dengan daerah perbatasan Singkel yang karena alasan-alasan historis - berhubung bahagian daerah ini jauh sebelum ditaklukkan oleh Belanda - merupakan bahagian dari keresidenan Tapanuli dan karenanya telah diikuti bentuk tersebut ketika diundangkan bentuk-bentuk pemerintahan bagi daerah-daerah lain.

Aparat-aparat pemerintahan adat yang dipergunakan itu terdiri dari lk. 100 orang ulèebalang/kepala pemerintahan-sendiri di dalam "daerah yang diperintah tidak langsung" dan lk. 50 orang panglima sagi, ulèebalang, kepala-kepala mukim yang berpemerintahan-sendiri dan kepala-kepala rakyat dengan nama-nama lain di dalam "daerah yang diperintah langsung", dan memperlihatkan suatu kesatuan yang aneka-ragam.

Luas daerah-daerah itu berkisar dari sebuah kampung sampai dengan sebuah propinsi di negeri Belanda dengan penduduknya yang berjumlah dari beberapa ratus sampai 50.000 orang dengan tingkatan pendidikan para kepala pemerintahannya dari sekolah rakyat (bhs. Bld. "volksschool yang berkelas 3) yang sederhana sampai dengan sekolah pemerintahan dalam negeri (bhs. Bld. "bestuursschool") di Betawi, dengan memperoleh penghasilan dari beberapa puluh sampai dengan jumlah 500 rupiah sebulan dan lebih tinggi, ditambah lagi dengan penghasilan-penghasilan sampingan lainnya dari usaha-usaha pertanian dan pertambangan, pemilikan

=tanah=

tanah-tanah, perusahaan-perusahaan sendiri dsb.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika dalam pelaksanaan susunan pemerintahan adat yang berkelompok-kelompok itu timbul kesukaran-kesukaran yang aneh. Untuk menggabungkan dan meniadakan kenegerian-kenegerian itu supaya memudahkan urusan-urusan ketatausahaannya diperlukan tindakan yang sangat hati-hati sekali, karena telah dibuktikan oleh praktek-praktek yang dijalankan ketika dimulainya pemerintahan Belanda di Aceh yang pada setiap perobahan aparat pemerintahan adat, memberi alasan untuk timbulnya gerakan-gerakan pemberontakan yang baru.

Oleh karena itu dengan "menggunakan" aparat_aparat tersebut, kebijaksanaan pemerintah ditujukan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum serta mempertahankan kemakmuran di dalam daerah dan untuk berkembangnya budaya.

Dengan sendirinya jelaslah, bahwa, justru disebabkan keadaan-keadaan kepala-kepala pemerintahan yang aneka-ragam itulah, secara umum, dibandingkan dengan daerah-daerah lain, hanya sebagian kecil saja dari tugas-tugas pemerintahan itu dapat diserahkan kepada aparat-aparat pemerintahan adat tersebut, sementara banyak masälah-masälah dan urusan-urusan pemerintahan lain harus dilaksanakan oleh pegawai pemerintah Belanda, sedangkan di daerah-daerah lain hal itu dapat diserahkan kepada pemerintahan bumiputera. Walaupun demikian, kebijaksanaan pemerintah - dalam hal-hal tertentu - selalu diusahakan untuk meningkatkan keaktifan para kepala rakyat sendiri. Namun demikian harus pula dicarikan suatu perimbangannya antara ukuran syarat-syarat pemerintahan Barat yang modern dengan syarat-syarat pemerintahan Belanda untuk tidak membiarkan sebuah "bayangan" menyelubungi pemerintahan bumiputera sehingga dapat mematikan rangsangan perasaan untuk bertanggung-jawab pada para kepala pemerintahan-sendiri itu, suatu tingkatan yang, dalam hal-hal tertentu, pernah dicapai.

Kapasitas pk.rt. para kepala pemerintahan-sendiri itu dalam menentukan tingkatan kecerdasan bekerja-sendiri haruslah merupakan jalan keluar dan karenanya tidaklah dapat dicegah adanya tenaga-tenaga yang berpendidikan di antara mereka yang

=hampir=

hampir_hampir tidak memuaskan hasil pekerjaan mereka, terutama jika mereka itu bertugas dalam daerah-daerah yang lebih kecil.

Berhubung dengan itu, maka diadakanlah usaha supaya pemerintahan bumiputera memiliki ukuran-ukuran Barat yang modern dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Pada satu pihak diusahakan untuk membersihkan pemerintahan adat yang turun-temurun berdasarkan adat kebiasaan orang Timur itu, dengan jalan meninggikan penghasilan kepala-kepala itu yang kadang_kadang tidak sah guna kepentingan rakyatnya dan selanjutnya untuk melenyapkan tindakan-tindakan kesewenang-wenangan mereka yang seringkali terjadi di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan-sendiri. Pada pihak lain diusahakan memperbesar efficiency pemerintahan, a.l. dengan jalan memberikan pendidikan kepada calon-calon kepala rakyat, sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan syarat-syarat jabatan mereka di masa yang akan datang dan dengan pengadaan tenaga-tenaga yang baik di kantor-kantor mereka. Akibatnya itu ialah, bahwa terhadap penyelewengan-penyelewengan yang telah mereka lakukan itu semakin ditindak, walaupun tindakan itu menurut selera orang banyak, belum cukup keras. Juga dalam hal ini timbul kekhawatiran di pihak pemerintah kalau-kalau akan terjadi ketidak-seimbangan di dalam aparat-aparat pemerintahan adat itu jika dilakukan penggantian kepala-kepala yang berhak.

Dari kejadian-kejadian di masa-masa belakangan ini timbul pertanyaan apakah kekhawatiran itu tidak terlalu dibesar-besarkan dan apakah tidak lebih layak untuk lebih keras melakukan penindakan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan itu.

Dalam hal ini kita tidak harus melupakan, bahwa politik kotor yang amat memalukan yang dilakukan oleh para kepala itu akhirnya memberi kesan rakyat yang tidak baik terhadap kebijaksanaan pemerintah Belanda juga. Penggantian Teuku Chi' Muhamad Thayéb, kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Peureula' (wilayah Langsa) yang menggemparkan dalam tahun 1934 dan begitu juga halnya dengan penggantian Teuku Umar, kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Keumangan (wilayah Sigli) dalam tahun 1938 menunjukkan, bahwa juga penggantian kepala-kepala pemerintahan-sendiri yang ternamapun dapat diterima oleh rakyat. Oleh karena

=yang=

yang disebut itu termasuk ke dalam kelompok ulèebalang yang berhaluan modern dan cerkas, sedang yang terakhir termasuk ke dalam kelompok kepala pemerintahan tua yang turun-temurun dan zalim, yang kedua-duanya telah diturunkan dari jabatan mereka disebabkan penyelewengan-penyelewengan yang telah mereka lakukan itu, maka penggantian itu menunjukkan, bahwa kejahatan tidak terbatas kepada suasana lama yang tumbuh dalam benak kepala-kepala pemerintahan lama saja, tetapi tradisi tersebut telah diteruskan juga oleh golongan-golongan yang lebih muda dan modern pandangannya.

Jadi - seperti telah diterangkan itu - seluruh pemerintahan berada dalam tangan kasta adat tertentu, yakni kasta keturunan ulèebalang yang turun-temurun yang telah meluas disebabkan tali perkawinan antara sesamanya atau dengan berbagai-bagai cara lain. Namun demikian tokok (=hegemonie) ini tidaklah terbatas di bidang pemerintahan saja, karena, sesuai dengan "adat", peradilanpun berada didalam tangan mereka itu, sedang mereka, sesuai pula dengan "hukôm" (=undang-undang agama), menjadi kepala agama di dalam daerah mereka.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, para kepala pemerintahan-sendiri itu mempunyai kepentingan-kepentingan dagang dan perekonomian yang penting, termasuk pula penilikan tanah-tanah secara besar_besaran, terutama dalam daerah Pidie (wilayah Sigli, Meureudu dan Lammeulo), daerah-daerah tempat masih berlakunya sistim feodal abad pertengahan.

Di samping itu, berhubung anak-anak para ulèebalang mendapat prioritas pertama dalam pendidikan, maka bidang intelekpun menjadi monopoli mereka, sedemikian rupa, sehingga para intelek Aceh yang tidak berasal dari kasta ini tidak sedikit mengalami handicap dalam posisi-posisi kepemimpinan jika mereka itu berhubungan dengan para ulèebalang.

Dalam pada itu, dalam tahun-tahun yang berjalan, di samping kasta adat ini telah timbul pula kelompok yang semakin membesar dari unsur muda dan intelek yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Barat modern yang tidak mau lebih lama lagi berada di bawah hubungan adat yang turun-temurun itu dan menginginkan pembaharuan pemerintahan berdasarkan demokrasi Barat. Kendatipun pi-

hak pemerintah menyadari sepenuhnya, bahwa hanya dengan jalan pendemokrasian pemerintahan adat yang telah turun-temurun itu sajalah dapat dicapai perdamaian antara pertentangan-pertentangan itu, namun pemerintah menganggap belum datang masanya untuk mengadakan pembaharuan itu. Baik untuk mengadakan Dewan Aceh dalam bentuk - seperti akan kita lihat di muka nanti - yang dipropagandakan di dalam pers maupun yang dikemukakan oleh anggota Dewan Rakyat yang terhormat, Tuanku Mahmud, di dalam Dewan supaya diadakan pendemokrasian pemerintahan uleebalang, namun pemerintah menganggap belum masak waktunya untuk menuju ke arah itu.

Dalam pada itu pemerintah memang telah melakukan usaha-usaha pertama secara tertegun-tegun untuk memberikan beberapa serta-kuasa (=medezeggenschap) kepada rakyat melalui kepala-kepala pemerintahannya dalam menanggulangi kepentingan-kepentingan umum di seluruh daerah. Dalam tahun 1941 residen Pauw (+) telah mengambil initiatif untuk mengadakan konperensi pemerintahan yang setiap wilayah turut diwakili oleh seorang kepala pemerintahan bumiputera yang ditunjuk oleh residen. Dalam konperensi itu berbagai-bagai kepala dinas telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai maksud dan tujuan dinas-dinas mereka. Antara lain dihubungkan dengan penetapan anggaran belanja Pusat kas-kas kenegerian yang biaya-biayanya harus dibebankan kepada sumbangan-sumbangan kas-kas wilayah. Dikandung maksud, agar dengan cara demikian dapat diciptakan sebuah organ yang dapat tumbuh dengan berangsur-angsur menjadi sebuah badan berdasarkan sendi-sendi demokrasi Barat modern. Ta' usah disebut secara panjang lebar di sini, bahwa, selama usaha ini tidak serempak jalannya dengan pendemokrasian aparat-aparat pemerintahan bumiputera sendiri, maka penyertaan golongan-golongan intelek muda dalam bentuk ini akan sedikit sekali dapat memberi kepuasan mereka.

Barangkali bukan tidak berguna untuk dimintakan perhatian di sini sehubungan dengan hal ini mengenai masalah lain dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintah, terutama di bidang keuangan kenegerian. Penggabungan keuangan-kenegerian-kenegerian secara

---

=wilayah=

(+) Residen J. Pauw menggantikan residen J. Jongejans pada tanggal 30 September 1938.

A.B.

wilayah (kecuali untuk wilayah-wilayah Sigli, Lammeulo dan Meureudu yang memiliki sebuah kas bersama) memberi keuntungan, bahwa pengelolaan keuangan itu dapat diawasi lebih seksama dalam jangkauan kepala-kepala pemerintahan itu secara lokal. Namun kerapkali juga terjadi pertentangan-pertentangan yang tajam antara Urusan Pemerintah dengan kas-kas kenegerian yang miskin yang dibantu dengan sumbangan pemerintah dan kadang-kadang sukar pula utk dijalankan dengan sempurna.

Sebuah hal lain yang perlu dimintakan perhatian ialah adanya berbagai-bagai ketegangan yang timbul di dalam kelompok para ulèebalang sendiri. Dengan ini saya maksudkan, pertama-tama, pertentangan-pertentangan yang historis yang telah terjadi antara Panglima-panglima sagi di dalam daerah Aceh Besar dengan para kepala pemerintahan-sendiri di luarnya. Berdasarkan kepada kedudukan historis mereka itu sebagai penasihat_penasihat langsung sultan, berbeda halnya dengan susunan pemerintahan yang telah dijalankan oleh pemerintah, maka para "kepala rakyat" ini menganggap diri mereka lebih utama dari pada "kepala-kepala pemerintahan-sendiri" (yang diangkat oleh pemerintah Belanda) dan karenanya, dalam sesuatu keadaan, mereka itu berusaha untuk menanggulangi kepentingan-kepentingan bersama. Saingan-saingan mereka yang terutama sekali adalah para kepala pemerintahan-sendiri di dalam daerah Pidie yang kaya dan banyak penduduk itu yang menganggap dirinya pula sebagai titik-berat di dalam daerah Aceh yang ta' kalah pentingnya dari daerah Aceh Besar.

Selebihnya kedudukan Panglima_panglima sagi itu dari dalam merupakan hal yang menarik juga. Kebijaksanaan pemerintah terhadap kedudukan sagi mereka menunjukkan sebuah garis yang kurang tetap pula dan bervariasi menurut pandangan masing-masing kepala pemerintahan itu, yang sekali ini dianggap mereka itu sebagai penghubung urusan-urusan pemerintahan yang tidak berguna, yang di samping ulèebalang dengan kepala-kepala mukim yang berpemerintahan sendiri di dalam sagi, sesudah peniadaan kesultanan, sebenarnya tidak berfungsi lagi, dan di lain kali mereka itu dianggap sangat diperlukan dalam hal memperkuat kedudukan dan untuk memperluas kekuasaan mereka serta menjalankan pemerintahan secara lebih efficien. Di tahun-tahun belakangan, pendirian terakhir ini

=menjadi=

menjadi lebih menonjol dan dengan diberikannya hak turut-serta untuk menanggulangi setiap urusan pemerintaha, kedudukan mereka menjadi semakin terbina, sementara dengan pembentukan apa yang dinamakan "dana sagi", kepentingan sagi sebagai kesatuan lingkup (=overkappende eenheid) menjadi menonjol. Ta' perlu kiranya dijelaskan di sini, bahwa penghargaan terhadap kedudukan Panglima-panglima sagi yang berbagai-bagai itu sebagiannya disebabkan oleh perjuangan yang historis untuk membatasi kekuasaan antara para Panglima sagi dan ulèebalang2serta kepala-kepala mukim yang berpemerintahan-sendiri di dalam masing-masing daerah hukum mereka, yang pada setiap pelaksánaan tugas pemerintahan oleh para Panglima sagi yang lebih menonjol dari pada "primus inter pares" mendapat hambatan pula.

Penarikan garis-petunjuk untuk membina sistim pemerintahan untuk daerah Aceh Besar di masa depan yang menjadi semakin kompleks disebabkan adanya beberapa daerah ulèebalang yang berpemerintahan sendiri, bahkan dari kampung-kampung yang berpemerintahan-sendiri di luar daerah ketiga sagi, dengan sendirinya menimbulkan kesukaran-kesukaran yang ta' terselesaikan. Haruskah penyelesaian itu dicari di dalam "pemulihan" pemerintahan-sendiri, jika ya, kedudukan apakah harus diberikan kepada Panglima-panglima sagi dalam hubungannya dengan para ulèebalang, kepala-kepala mukim yang berpemerintahan-sendiri di dalam daerah mereka itu, untuk tidak membicarakan mengenai penyesuaian kedudukan para ulèebalang dan kepala-kepala kampung yang berpemerintahan-sendiri di luar hubungan kesagian itu? Sekiranya penyelesaian itu harus dicari melalui "inlandse gemeente-ordonnantie" atau peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu, maka ini berarti penerusan pertentangan-pertentangan terhadap pemerintahan-pemerintahan-sendiri dan perbedaan posisi antara kepala-kepala rakyat di dalam daerah Aceh Besar dengan para kepala pemerintahan-sendiri di luar daerah itu. Keputusan yang prinsipiil dalam dilemma ini tidak diambil; penyelesaian yang memuaskan tidak ditemukan. Sebaliknya kesukaran-kesukaran ini tidak terdapat di dalam daerah yang langsung diperintah di dalam wilayah Singkel. Pemulihan pemerintahan-sendiri dalam daerah ini pada dasarnya ti-

=dak=

dak menimbulkan kesukaran apa-apa.

Sedikit banyaknya paralel dengan pertentangan-pertentangan ini yang terjadi dalam hubungan kesagian, hal itu telah timbul pula dalam beberapa wilayah (a.l. Lhô' Sukôn, Bireuen, Lhô' Seumawè) karena diakibatkan oleh antithese antara para ulèebalang dengan bawahan-bawahannya yang tergabung ke dalam organisasi-organisasi adat yang berada di bawah mereka itu dengan berbagai-bagai namanya. Antithese ini timbul dari keinginan kepala-kepala bawahan untuk mendapatkan kemerdekaan yang menentang setiap usaha ulèebalang yang memperbesar kekuasaannya di dalam daerah mereka. Kebijaksanaan pemerintah yang dijalankan dalam hal ini - seperti jelas dapat dilihat - didasarkan a.l. kepada pertimbangan-pertimbangan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang praktis yang terlebih dulu ditujukan kepada memperkuat wibawa ulèebalang.

Akhirnya saya mengingatkan lagi di sini mengenai pertentangan-pertentangan yang timbul antara kelompok-kelompok tertentu para ulèebalang dalam suatu daerah tertentu, kadang-kadang akibat dari antithese yang historis sebelum hadirnya pemerintah Belanda di Aceh dan dalam hubungan ini perlu disebut federasi-federasi yang telah terjadi secara historis di daerah Pidie dan Aceh Barat.

Jika di atas telah dijelaskan sebuah ikhtisar mengenai berbagai-bagai ketegangan yang terdapat di dalam kelompok ulèebalang dan konsekwensi-konsekwensi yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah, maka - seperti akan dapat dilihat dalam bahagian berikut ini - pertentangan-pertentangan itu segera dapat dijembatani ketika kedudukan mereka itu diancam dari luar oleh adanya gerakan untuk menghidupkan kembali kesultanan Aceh.

Tinjauan di atasmengenai kasta ulèebalang saya rasa tidak lengkap jika tidak ditumpahkan perhatian terhadap unsur-unsur pribadi yang kuat yang menentukan perhubungan kekuasaan di dalam kelompok itu. Kewibawaan pribadi para kepala pemerintahan-sendiri atau panglima-panglima sagi tertentu telah mempengaruhi situasi politik selama bertahun-tahun dan menentukan perhubungan-perhubungan kekuasaan serta kebijaksanaan pemerintah. Gugurnya tokoh-tokoh demikian karena meninggal atau karena hal-hal lain, biasanya turut mengobah seluruh aspeknya dan disebabkan perobahan per-

hubungan-perhubungan kekuasaan itu, maka dapat pula melenyapkan baik masälah-masälah lama maupun menimbulkan masälah-masälah kebijaksanaan pemerintah yang baru.

Sehubungan dengan tinjauan ini, maka pada tempatnyalah untuk membicarakan di sini mengenai tokoh-tokoh pemimpin di antara ulèebalang-ulèebalang itu yang kerapkali akan dijumpai dalam bahagian-bahagian berikut. Dalam hal ini, pertama-tama, saya jatuhkan pilihan kepada Teuku Nya' Arif, Panglima sagi XXVI mukim dalam wilayah Kutaraja dan Teuku Muhamad Hasan, kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Glumpang Payông dalam wilayah Sigli, terutama sekali karena kedua ulèebalang ini - yang sejak pemerintahan Belandapun telah mempunyai kedudukan penting - telah memainkan peranan pimpinan di masa pendudukan Jepang. Teuku Nya' Arif, seorang abiturien "Osvia" (Opleidingsschool voor inlandse ambtenaren = sekolah pendidikan pegawai-pegawai pemerintahan bumiputera), wakil Aceh di dalam Dewan Rakyat yang pertama (+), kawin de-

=ngan=

(+) Keterangan ini, menurut hemat penterjemah, adalah keliru. Wakil-wakil Aceh dalam Dewan Rakyat (=Volksraad) adalah:
1. Teuku Chi' Muhamad Thayéb Peureula' (23/2-1918 - 19/5-920).
2. Teuku Nya' Arif (16/5-1927 - 1931).
3. Tuanku Mahmud (15/6-1931, 19/6-1935 dan 15/6-1939 - 1942).
Ketiga-tiga mereka itu diangkat berdasarkan pasal 55 ayat 3 "Indische Staatsregeling".

Teuku Nya' Arif banyak memainkanperanan pada waktu akan berakhirnya pemerintahan Belanda di Aceh. Salah satu tindakannya yang patut dicatat di sini ialah tawaran beliau kepada pemerintahan Belanda di Aceh melalui residen Pauw, dalam pembicaraan politik pada tanggal 8 Maret 1942 yang turut dihadiri oleh Tuanku Mahmud yang meminta supaya urusan-urusan pemerintahan di Aceh diserahkan kepada beliau dengan catatan, bahwa dalam hal itu beliau akan bertanggungjawab untuk memelihara keselamatan jiwa dan milik orang-orang Eropah sampai dengan datangnya orang-orang Jepang, suatu tawaran yang tidak dapat dipertimbangkan oleh pihak pemerintahan Belanda. ("Atjeh en de Oorlog met Japan", halaman 71 dan 125).

Pada permulaan R.I. beliau diangkat menjadi Residen daerah Aceh dan "generaal Majoor titulair".

Dalam perebutan kekuasaan terhadap beberapa orang pemimpin R.I. di Kutaraja yang dilakukan oleh Husin al Mujahid selaku pemimpin T(entara) P(erlawanan) R(akyat) pada awal tahun 1946, Teuku Nya' Arif ditangkap dan diasingkan ke Takèngon; beliau meninggal di dalam tawanan pada tanggal 4 Mei 1946 dan dimakamkan di pekuburan keluarganya di Lam Reueng (Lam Nyong). Pada batu nisan almarhum dapat dibaca tulisan: "T. Nja' Arif bin T. Nja' Banta,

=lahir=

ngan seorang wanita Padang, tidak syak lagi adalah seorang yang paling kuat kepribadiannya di antara uléebalang-uléebalang Aceh. Tubuhnya kecil, berumur kira-kira 40 tahun dengan temperamen pemarah, seorang pembicara yang petah dan jik orang berhadapan dengan beliau ia akan merasakan kepribadiannya itu. Beliau adalah seorang nasionalis yang kuat. Karena sadar akan kepribadian dan pengaruhnya itu, maka beliau merupakan sebuah masalah dan batu penarung juga bagi banyak pegawai-pegawai pemerintah Belanda. Dalam dunia Indonesia dan bagi rakyat serta kolega-kolega beliau, Teuku Nya' Arif sangat dihormati, walaupun perasaan hormat itu kadang-kadang didasarkan kepada ketakutan kepada beliau.

Teuku Muhamad Hasan memperoleh pendidikannya pada sekolah pemerintahan dalam negeri di Fort de Kock (Bukinttinggi). Bertahun-tahun lamanya beliau bekerja di kantor Pusat kas-kas kenegerian dan mempunyai pengaruh yang besar sebagai seorang penasihat pemerintah yang tidak resmi; beliau amat berpengaruh dalam kebijaksanaan pemerintah di bidang politik. Dalam tahun-tahun itu, beliau memegang peranan pimpinan dalam gerakan Indonesia sebagai konsul Muhammadiyah. Tubuhnya besar, gemuk dan karenanya dalam pergaulan sehari-hari beliau mendapat julukan sebagai "Hasan Dik" (=Hasan gemuk), berumur hampir 50 tahun, dengan pandangan mata yang tajam dan menembus, serta seorang tokoh yang mempesonakan. Otak beliau yang tajam dan kritis itu, pengetahuan beliau yang amat mendalam tentang keadaan orang-orang serta pandangan, aktivitas/ perasaan ingin dihormati dan keinginan untuk beramal banyak telah membuat diri beliau sebagai seorang yang amat berpe-
/nya. =ngaruh=

(Dari sebelah:)

lahir 17 Juli 1899, meninggal 4 Mei 1946".

Dr.Piekaar keliru menulis dalam bukunya itu mengenai tanggal meninggal almarhum pada 6 April 1946 (hal. 250). Ia menulis:
"Dari bulan Desember 1945 sampai dengan Februari 1946 telah berkecamuk peperangan saudara yang berakhir dengan hancurnya seluruh kekuasaan uléebalang. Banyak keturunan uléebalang yang telah dilenyapkan sampai kepada laki-laki yang terakhir. Beratus-ratus anggota keluarga uléebalang telah hilang sebagai "musuh Republik" dalam tawanan-tawanan Republik. Juga residen Republik yang pertama di Aceh, Teuku Nya' Arif, yang sejak tanggal 14 Desember 1945 memperoleh cuti-sakit selama dua bulan, telah mengalami nasib seperti itu. Pada tanggal 6 April 1946 ia meninggal dalam tawanan Republik di Takéngon akibat penyakit gula."

A.B.

ngaruh. Karena merasa terpanggil untuk menjadi seorang ulèebalang untuk menggantikan ayahnya yang telah meninggal, maka beliau tidak dapat memperoleh kepuasan dalam memerintah kenegeriannya yang kecil itu, sehingga karenanya kapasitasnya itu tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kepentingan-kepentingan pemerintahan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.(+)

Di samping kedua tokoh ini selama pemerintahan Belanda terdapat pula beberapa orang ulèebalang yang menonjol seperti Teuku Haji Chi' Muhamad Johan Alam Syah, kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Peusangan dalam wilayah Bireuen, Teuku Chi' Muhamad Daud Syah, kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Idi Raye' dalam wilayah Idi dan banyak yang lain-lain lagi yang akan saya uraikan wataknya dalam bahagian-bahagian yang berikut.

Sebagai penutup tinjauan ini adalah berguna sekali jika segera kita menaruh perhatian mengenai keadaan lain dari watak bangsa Aceh yang akan kita ikuti sebagai benang merah dalam kejadian-kejadian selanjutnya. Dengan ini saya maksudkan sikap kepahlawanan yang typis atau kesadaran kelompok yang selalu menimbulkan kesukaran-kesukaran baru bagi pemerintah. Sejauh berada dalam batas-batas yang sehat untuk menjadi 'tuan di rumah sendiri' dan untuk terus-menerus mengisi jabatan-jabatan dalam semua cabang-

=cabang=

(+) Dalam bulan Agustus 1944 Gumpo-kaigi dan Gunritu-kaigi (=pengadilan tentara Jepang) di Medan masing-masing telah menjatuhkan hukuman mati bagi bekas assistent_resident Aceh Besar, O. Treffers, dan 18 orang Indonesia, di antaranya termasuk Teuku Muhamad Hasan Glumpang Payông (yang telah ditangkap sejak bulan tersebut), Teuku Sulaiman Montasie' dan Rijal, bekas pokrol di Kutaraja (tawanan-tawanan yang berasal dari daerah Aceh) karena dipersalahkan terlibat dalam gerakan di bawah tanah menentang Jepang. Keputusan tsb. dijalankan pada tanggal 28 Agustus 1944 dekat Pancurbatu.

Dalam laporan pihak Jepang mengenai Teuku Muhamad Hasan (yang - menurut Dr. Piekaar (hal.316) - ditulis dalam susunan bahasa Inggeris yang centang-perenang) dinyatakan, bahwa beliau, kendatipun telah pernah mengunjungi negara Jepang, "hated ever so much against Japanese military administration".

A.B.

cabang pemerintahan dengan orang-orang sedaerah, ke situlah kebijaksanaan penerintah akan diarahkan. Ketinggalan-ketinggalan yang terjadi disebabkan terlambatnya penaklukan Aceh oleh Belanda, sehingga di masa-masa permulaan itu harus dipergunakan tenaga-tenaga luar daerah, haruslah dikejar dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu di tahun-tahun belakangan ini secara disadari kebijaksanaan pemerintah telah diarahkan kepada pendidikan pemuda-pemuda Aceh untuk mengisi berbagai-bagai jabatan pemerintahan dan dalam hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan prioritas kepada tenaga-tenaga bangsa Aceh dalam mengisi sesuatu jabatan yang calon-calonnya memiliki kapasitas yang sama. Dalam tinjauan-tinjauan berikutnya akan kita jumpai kembali corak watak bangsa Aceh yang lebih kuat dari pada bangsa-bangsa lain di Sumatera dan selalu saja dalam hubungan-hubungan lain dan untuk ini saya harap berkesempatan untuk menjelaskan konsekwensi-konsekwensinya yang berhubungan dengan perkembangan-perkembangan politik.

Jika pada penutup uraian ini saya memberikan kesimpulan mengenai sistim pemerintahan di daerah Aceh, maka timbullah pertanyaan apakah sistim penerintahan di daerah Aceh yang telah berurat-berakar dan timbul dari kelompok-kelompok serpihan aparat-aparat pemerintahan, yang heterogeen dan kolot dalam berbagai-bagai sudut dan apakah semua itu tidak menjadi suatu hal yang amat sukar yang tidak mungkin dapat dipecahkan melalui cara evolusi, tetapi harus ditempuh jalan-jalan yang revolusioner!?

---

§§ 3. Aliran-aliran politik dan keagamaan.

Juga dalam gerakan politik dan keagamaan terdapat cap kepahlawanan Aceh yang khas. Hal itu disebabkan oleh ketiadaan kelompok-kelompok partai politik yang berasal dari Jawa dan adanya pencarian jalan akan keinginan politik dalam bentuk gerakan spesifik Aceh - sebagai akibat dari watak yang typis Aceh - sehingga karenanya menimbulkan corak keagamaan yang kuat.

Partai-partai politik kebangsaan seperti PARINDRA dan P(artai) N(asional) I(ndonesia) hanya sedikit sekali berhasil

=memperoleh=

memperoleh pengikut-pengikutnya, walaupun di antara pemuda-pemuda intelek Aceh yang ingin melepaskan dirinya dari hubungan adat. Pengikut-pengikut itu terdiri hanyalah dari mereka yang datang dari luar Aceh dan itupun dalam jumlah yang tidak banyak, sehingga gerakan itu, di luar beberapa pengecualiannya, terbatas kepada anggota-anggota perorangan saja. Pengecualian itu hanya mengenai wilayah Sabang; di sana terdapat sebuah cabang PARINDRA yang berkembang dengan baik, sebagai satu-satunya wilayah di dalam daerah Aceh dan itupun terbatas kepada pegawai-pegawai bukan-orang Aceh pada rumah sakit jiwa, pegawai-pegawai maskapai Sabang dan golongan-golongan intelek lainnya.

Perkumpulan sekolah kebangsaan TAMAN SISWA terdapat di Aceh hanya di beberapa tempat saja, a.l. di Kutaraja dan Sabang.

Gerakan-gerakan kebangsaan dan komunis yang ekstrim yang dalam tahun-tahun 1919/1920 dan 1926/1928 pernah terdapat di Aceh, terutama setempat-setempat dan di sana-sini pernah juga menghinggapi golongan-golongan uleebalang, boleh dikatakan tidak ada meninggalkan bekas-bekasnya lagi. Pengaruhnya itu hanya terbatas kepada aktivitas-aktivitas setempat-setempat yang tidak berarti dari orang-orang bekas buangan Digul yang dikembalikan. Di antara mereka itu yang sangat militan bernama Muhamad Din, bekas guru sekolah rakyat di Blang Kejeren, yang berhubung dengan aktivitas-aktivitas komunis dalam tahun 1926, telah dibuang ke Digul. Sekembalinya dari sana ia telah memainkan peranan penting dalam gerakan-gerakan keagamaan di wilayah Gayo Luös dan Tanah Alas; di sana ia berusaha juga untuk mendirikan sejenis organisasi vak setempat. Hubungannya terhadap kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Gayo Luös yang masih muda-belia, ... Teuku Raja Husin, yang seolah-olah dapat dipengaruhinya, ta' pernah jelas diketahui wujudnya^ itu. Juga gerakan-gerakan vak, terutama di kalangan guru-guru, pegawai-pegawai kereta-api dan terakhir supir-supir, tidak memperlihatkan watak yang menonjol.

Kekosongan gerakan-gerakan politik terkenal yang tersebar di seluruh Indonesia dan adanya watak Aceh yang typis pada gerakan-gerakan agama di dalam daerah Aceh sebagai pengganti gerakan-gerakan politik itu memberi petunjuk, bahwa daerah Aceh tampaknya

seolah-olah tidak memerlukan adanya badan P(olitieke) I(nlich-tingen) D(ienst) sendiri dan untuk urusan-urusan pemerintahan hanya dipadai dengan menggunakan saluran yang sejak lama diakui telah memberi hasil yang baik untuk menampung liran-aliran masyarakat Aceh, yakni dengan perantaraan para ulèebalang. Akan tetapi di tahun-tahun belakangan semakin dirasakan, bahwa saluran tersebut tidak memadai lagi, berhubung gerakan-gerakan agama - seperti akan ternyata dari tinjauan berikutnya - semakin lama semakin berusaha melepaskan diri dari pengawasan kelompok para ulèebalang, sehingga tidak memungkinkan lagi diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai perkembangan aliran-aliran tersebut.

Berhubung aparat kepolisian setempat yang biasa sifatnya itu hanya sedikit sekali dapat mencukupi kekurangan ini, maka di dalam usul-usul pembaharuan yang dibicarakan dalam ss pertama bahagian ini termasuk juga penubuhan sebuah aparat polisi-lapangan (=veldpolitie) untuk daerah Aceh yang akan merupakan aparat intelijen pusat yang khusus.

Di luar gerakan-gerakan agama yang akan disinggung di bawah ini dan di luar gerakan-gerakan politik yang telah dijelaskan sebelumnya, keinginan pembaharuan itu telah berusaha mencari jalan keluar dalam dua buah aksi politik yang menggemparkan dalam tahun 1938 dan di tahun-tahun berikutnya.

Aksi pertama dari kedua aksi-aksi itu pada mulanya hanya terbatas kepada aksi yang dilakukan di dalam pers Indonesia; pada waktu itu dikemukakan keinginan untuk mengadakan Dewan Aceh sebagai badan perwakilan yang berazaskan demokrasi, di mana golongan-golongan intelek muda harus memberikan "serta-kuasanya" dalam pelaksanaan pemerintahan di luar hubungan adat.

Selain di dalam harian-harian yang terbit di Medan seperti "Pewarta Deli" dan "Sinar Deli", dilakukan juga propaganda di dalam majalah "Penyedar", juga diterbitkan di Medan yang banyak sekali memberikan tempat kepada pembantu-pembantunya untuk menulis mengenai keadaan di daerah Aceh. Seorang tokoh militan bernama Abdoel Karim Ms., yang kawin dengan seorang wanita Padang di Langsa, menjadi pengasuh "rubrik Aceh" di dalam harian "Sinar Deli". Aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang bukan-Aceh itu

=tidak=

tidak pula banyak mendapat sambutan di kalangan rakyat, berbeda halnya dengan aksi yang kedua yang spesifik Aceh mengenai pemulihan kesultanan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai aksi ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan keturunan-keturunan sultan dan perkembangan pikiran untuk memulihkan kesultanan itu. Di samping pretenden-sultan yang telah dibuang ke Betawi, Tuanku Muhamad Daud, keluarga sultan mempunyai banyak anggota-anggotanya yang tinggal di Aceh dan kebanyakan mereka itu berada dalam keadaan tidak mampu dan selalu hidup dari tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Di antara keturunan-keturunan sultan itu ada seorang putera pretenden-sultan bernama Tuanku Ibrahim yang kawin dengan puteri Teuku Umar, kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Keumangan, seorang yang kurang dikenal. Ta' lama setelah ia kembali dari pengasingannya bersama-sama ayahnya itu, ia menetap sebagai seorang petani di Lammeulo; di sana ia - tampaknya - menjauhkan diri dari setiap percaturan politik.

Tokoh penting di antara cabang lain keluarga-keluarga sultan itu adalah Tuanku Mahmud, yang, setelah menempuh pendidikan pada sekolah pemerintahan dalam negeri di Betawi, beberapa tahun lamanya pernah menjabat tugas-tugas pemerintahan di Sulawesi dan akhirnya kembali ke Aceh. Di Aceh ia diberi kedudukan sebagai "Inlands ambtenaar ter beschikking van de resident" (=pegawai bumiputera yang diperbantukan pada residen Aceh).

Tuanku Mahmud, berkat kepribadiannya yang sopan-santun, berhasil memperoleh banyak teman-temannya; ia pernah mengadakan perjalanan-studi ke negeri Belanda dan kawin dengan puteri-mahkota kerajaan Serdang (Sumatera Timur) yang membuat kedudukannya di dalam pandangan masyarakat semakin menonjol lagi.

Dalam tahun 1931 ia menggantikan Teuku Nya' Arif, seorang Panglima sagi yang kuat di dalam XXVI mukim, sebagai anggota Dewan Rakyat yang dengan caranya yang sopan berhasil mengurus kepentingan-kepentingan daerah Aceh sampai dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Juga di dalam Dewan ia berhasil memperoleh banyak teman-temannya, baik dalam fraksi-fraksi Belanda maupun Indonesia. Sebagai pegawai bumiputera yang kemudian menjadi "pegawai tinggi diperbantukan", kedudukannya itu sudah bagus sekali. Karena ia seorang

yang ta' suka mencari-cari konflik, maka ia pun tidak mau menuntut sesuatu yang secara hati-hati dipercayakan kepadanya, karena khawatir akan timbulnya konsekwensi-konsekwensi politik, yakni jabatan penasihat politik tertinggi Indonesia yang ke dalamnya memang termasuk tugasnya itu. Dalam beberapa hal yang dimintakan bantuannya oleh pemerintah untuk memecahkan konflik-konflik politik, ia selalu mendapat hasil yang baik, berkat kewibawaan keturunannya itu.

Salah satu dari pertimbangan-pertimbangan yang membuat pemerintah berhati-hati untuk memperluas pengaruhnya ialah - tentu saja - adanya antithese antara kepala keluarga sultan yang diperebutkan itu dengan kelompok ulèebalang setelah mangkatnya pretenden-sultan dalam tahun 1939.(+) Bekas wakil-wakil sultan itu (y.i. para ulèebalang) merasa terancam kedudukan mereka melihat kepada Tuanku Mahmud selaku golongan tokoh sultan Aceh. Kendatipun para ulèebalang itu - seperti telah dijelaskan dalam § yang lalu - sejak masa kesultanan merupakan kepala-kepala negeri yang sesungguhnya, namun dalam pandangan rakyat Aceh umumnya tidaklah dapat dihilangkan kesan, bahwa sultan itu adalah dan tetap menjadi Penguasa mereka yang tertinggi di dalam daerah, sehingga terdapat alasan yang masuk akal sekali, bahwa gagasan pemulihan kesultanan itu lebih mendalam timbulnya pada rakyat umum dari pada untuk mempercayainya timbul pada kelompok ulèebalang.

Dalam kerangka ini pulalah harus dilihat aksi-aksi yang timbul pada setiap kali diperbaharuinya mandat yang diberikan kepada Tuanku Mahmud untuk duduk sebagai anggota Dewan Rakyat, terakhir dalam tahun 1939. Pada waktu itu berbagai-bagai kelompok ulèebalang, kendatipun untuk sementara, telah melupakan perselisihan-perselisihan mereka pada masa yang lalu. Daerah Aceh Besar dan Pidie sama-sama keluar dengan seorang atau lebih lawan kandidat yang menyampaikan permohonan kepada Wali Negara (=gubernur jenderal Hindia-Belanda) supaya pemerintah mengangkatnya. Kedudukan Tuanku Mahmud yang tidak tergantung pada kelompok ulèebalang, di samping integritasnya, telah menyebabkan pemerintah untuk setiap kali menyingkirkan keberatan-keberatan tersebut sehingga Tuan-

=ku=

(+) Jelasnya tanggal 6 Februari 1939 di Jatinegara (sekarang).

A.B.

ku Mahmud diangkat kembali, baik dalam tahun 1935 maupun dalam tahun 1939.

Dalam masa pengangkatan-kembalinya yang terakhir itulah telah dilakukan gagasan untuk memulihkan kesultanan Aceh. Initiatif untuk aksi ini datangnya dari dua orang Aceh terkenal di Kutaraja, bernama Nya' Mansur dan Teungku Nya' Sarung. Yang disebut pertama adalah seorang pokrol terkenal yang sudah tua dan mendapat kepercayaan rakyat; yang disebut terakhir mengusahakan a.l. sebuah kantor lelang, sebuah hotel, sebuah pertukangan perabot rumah-tangga dan terakhir bahkan menjadi pemborong keperluan-keperluan para tawanan Jerman di Lawé Sigala-gala serta menjadi kepala kampung untuk sebagian terbesar penduduk kota Kutaraja. Mereka itu melakukan aksi mereka baik melalui pers maupun dengan jalan mengumpulkan tanda-tanda tangan rakyat di seluruh daerah Aceh untuk permohonan-permohonan yang akan disampaikan kepada Wali Negara. Kelompok ulèebalang yang melihat gerakan tersebut dengan pandangan yang sedih ("die deze beweging met lede ogen aanzag") telah melakukan aksi dalam berbagai-bagai kenegerian, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, bahkan akhirnya, demi mempertahankan kepentingan bersama, mereka itu terpaksa telah mengorganisir sebuah perkumpulan di bawah pimpinan beberapa orang kepala-kepala pemerintahan-sendiri yang terkemuka di Pidie! Apakah dalam hal ini timb l pertimbangan, bahwa kedudukan kelompok ulèebalang tidak sekuat yang disangka dari luar dan apakah gagasan untuk memulihkan kesultanan yang melangkaui kepala para ulèebalang itu memang benar-benar ditimbulkan dari naluri yang mendalam pada bangsa Aceh sebagai sebuah pikiran yang pernah dikemukakan oleh Tuanku Mahmud dalam suatu pembicaraan dari hati ke hati? Hanya dua orang kepala pemerintahan-sendiri yang terang-terangan telah memilih pihak pemuka-pemuka yang ingin memulihkan kesultanan Aceh; mereka itu ialah Tuanku Abdullah, kepala pemerintahan-sendiri sebuah kenegerian kecil bernama Seuneu'am di dalam wilayah Meulabôh, juga seorang anggota keluarga sultan dan Teuku Sabi, kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Lageuen di dalam wilayah Calang yang sama-sama tidak berarti itu. Yang disebut terakhir dan terkenal sebagai

seorang pemberani sekali di daerah Aceh Barat, secara terang-terangan telah menyatakan pendapatnya di dalam sebuah karangan yang dimuat ke dalam majalah "Penyedar" mengenai usaha pemulihan kesultanan itu.

Perlu dicatat di sini, bahwa Teuku Sabi dengan Nya' Mansur, yang sama-sama memiliki kebun-kebun besar dalam kenegerian Lam Beusoe, adalah sama-sama berteman akrab.

Aksi itu yang sampai juga ke Dewan Rakyat berakhir dengan tidak membuahkan apa-apa. Pemerintah menganggap tidak melihat adanya alasan-alasan untuk mempertimbangkannya. Timbullah kini pertanyaan: sejauh manakah Tuanku Mahmud, yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dianggap sebagai calon sultan, telah terlibat di dalam gerakan itu! Keterangan-keterangan yang diungkap oleh banyak uléebalang, bahwa Tuanku Mahmud sendiri telah memainkan peranan pimpinan, tampaknya tidak dapat diterima. Bahwa ia sendiri bukan tidak menyetujui diadakannya gerakan itu tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Sebaliknya betapa jauh para penggerak aksi itu melakukannya dengan keyakinan sendiri, sukar juga untuk menilainya; air muka yang tampak tidak menyenangkan pada wajah Teungku Nya' Sarung, atas pertanyaan apakah usahanya itu memberi pengharapan untuk memperoleh kejayaan di masa depan, tidak memberikan sesuatu jawaban.

Jika kini kita menujukan perhatian kita kepada gerakan agama, maka akan tampaklah kepada kita, bahwa satu-satunya organisasi agama yang berarti di Aceh pada mulanya adalah Muhamnadiyah yang bercabang di seluruh Hindia-Belanda yang - berdasarkan anggaran dasarnya - bertujuan memajukan pendidikan dan memperdalam studi agama Islam serta mengintensifkan hidup beragama di antara para anggotanya.

Sebagai konsulnya untuk daerah Aceh, mula-mula bertindak - seperti telah dijelaskan dalam § yang lalu - Teuku Muhamad Hasan Glumpang Payông yang kemudian diteruskan oleh Teuku Cut Hasan dari keturunan uléebalang Meura'sa (daerah uléebalang yang berpemerintahan-sendiri di luar ketiga sagi dalam wilayah Kutaraja).

=Umumnya=

Umurnya hampir 40 tahun, berpendidikan M.U.L.O, licin sebagai belut, seorang yang tidak jujur dan gila hormat, dengan pimpinannya itu lambat-laun ia telah berhasil memperkuat gerakan tersebut. Walaupun demikian dan kendatipun berada di bawah pimpinan orang Aceh, namun gerakan itu tetap merupakan gerakan yang bukan khas Aceh dan terutama menarik perhatian orang-orang yang bukan-Aceh (y.i. orang dagang!) yang merupakan kelompok militan setempat di dalam masyarakat Aceh.

Ketiadaan organisasi-organisasi politik seperti telah disebut itu telah menyebabkan orang-orang memuaskan aspirasi-aspirasi politik dan sosialnya pada satu-satunya organisasi yang telah ada, yakni Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan mengapa gerakan Muhammadiyah di Aceh, berbeda halnya dengan di Jawa yang merupakan sebuah gerakan agama yang sangat berarti, dikuasai oleh politik, suatu gejala yang terjadi juga di tempat_tempat lain di luar Jawa. Ke dalam sebab-sebab itu harus pula diperhitungkan adanya sebuah larangan (yang berlaku sampai dengan penyerbuan Jepang), yang menentukan, bahwa gerakan Muhammadiyah dilarang membentuk cabang-cabangnya di daerah Aceh Barat (yang terkenal kurang aman itu!) Praktek_praktek telah menunjukkan, terutama di tempat-tempat perkumpulan itu disalah-gunakan maksudnya [illegible] untuk menghidupkan agitasi-agitasi politik secara kecil-kecilan, umpamanya yang ditujukan kepada kepala-kepala pemerintahan tertentu, sehingga pihak yang menginginkan kesultanan dengan mudah dapat menghidupkan api perlawanan terhadap pihak lawan.

Larangan tersebut diciptakan dengan mufakat Pengurus Besar Muhammadiyah di Jawa dan oleh karenanya lebih banyak bersifat "gentlemen's agreement". Kendatipun Teuku Cut Hasan secara pro forma menyetujui peraturan tersebut, bahkan ia berjanji pula akan menjalankannya secara loyal, namun selalu saja terjadi, bahwa dalam agitasi-agitasi Muhammadiyah di daerah Aceh Barat terdapat adanya hubungan dengan konsulnya.

Sehubungan dengan perkembangan untuk memuaskan keinginan berpolitik seperti disebut di atas, juga di daerah Aceh Barat, maka dengan mufakat Pengurus Besar Muhammadiyah telah diadakan pelunakan dalam larangan tersebut, sedemikian rupa, bahwa dalam seti-

ap hal perlu dipertimbangkan secara khusus apakah di daerah Aceh Barat boleh atau tidak diizinkan pendirian sesuatu cabang Muhammadiyah.

Berdasarkan kekuatan peraturan tersebut, a.l. telah disetujui pendirian sebuah cabang Muhammadiyah di Calang yang berkembang dengan baik, sehingga memungkinkan berdirinya sebuah sekolah pendidikan Barat rendah berdasarkan agama Islam. Sekolah-sekolah Belanda Indonesia (=H.I.S.) seperti itu telah didirikan juga di berbagai-bagai tempat oleh perkumpulan tersebut. Namun demikian mereka itu tidak dapat bersaing dengan sekolah-sekolah Belnda Indonesia yang didirikan oleh pemerintah dan oleh karenanya mereka itu hanya mendirikannya di tempat -tempat yang tidak terdapat sekolah-sekolah Belanda Indonesia.

Organisasi-organisasi agama lain yang terdapat di daerah Aceh seperti cabang-cabang Jamiatul Wasliyah di Langsa, Kwala-simpang dan Idi, begitu juga halnya dengan perkumpulan-perkumpulan sekolah agama seperti Jamiatuddiniyah di Blang Pasèh dalam wilayah Sigli (dengan sekolah-sekolah sambungannya di tempat-tempat lain) dan berbagai-bagai sekolah agama yang lebih besar dalam wilayah Seulimeum, hanya memiliki watak setempat, kendatipun, terutama perkumpulan-perkumpulan sekolah agama itu - seperti ternyata kemudian - selalu merupakan tempat-tempat berseminya propaganda anti Belanda.

Jika kita bertanya apakah sebabnya sehingga gerakan Muhammadiyah gagal dalam usahanya menarik penghidupan beragama di Aceh, maka jawabnya itu - menurut hemat saya - ialah karena tempat-tempat yang menentukan di dalam gerakan itu pagi-pagi tidak mempunyai tempat bersembunyinya unsur-unsur agama yang typis Aceh dengan cara-cara setempat Aceh. Seluruh tujuan gerakan agama modern yang masih muda itu bertentangan sekali dengan pandangan kehidupan/agama yang berwarna konservatif orang Aceh. /ber

Di puncak penghidupan beragama ini berdiri ulama yang ahli di bidang hukum dan ajaran agama. Karena ketaatannya memperdalam agama dan selalu dikerumuni oleh murid-muridnya yang tidak sedikit jumlahnya itu, maka para ulama itu sangat dihor-

=mati=

mati rakyat. Kendudukan mereka itu dengan sendirinya lebih tinggi dari pada seorang além yang, kendatipun berpendidikan agama, tidak dianggap ahli, begitu pula halnya dibandingkan dengan seorang malém dan leubè, suatu sebutan yang dapat diberikan kepada setiap orang yang taat mengerjakan rukun-rukun agama.

Kedudukan yang lebih tinggi lagi ialah teungku meunasah (=teungku kampung) yang oleh orang Aceh disebut sebagai "ibu" kampung, sedang kepala kampung disebut "ayah" kampung (bhs. Aceh keuchi' eumbah, teungku ma). Teungku meunasah bertugas mengawasi penghidupan beragama sehari_hari; umumnya ia hanya memiliki pengetahuan elementer di bidang hukum-hukum agama jika dibandingkan dengan seorang ulama. Kategori orang-orang yang bertindak di bidang agama itu, seperti telah dinyatakan dalam § yang lalu, semuanya disebut teungku.

Para ulama itu yang sejak dahulu merupakan pemimpin_pemimpin Aceh di bidang kerohanian, kecuali beberapa orang, menjauhkan diri mereka dari gerakan Muhammadiyah. Hanya kelompok intelek-intelek muda saja yang hendak melepaskan diri dari hubungan adat, [illegible] mencari kepuasan di dalam gerakan Muhammadiyah.

Untuk pertama kali dalam sejarah Aceh, organisasi PUSA merupakan sebuah organisasi yang penghidupan dan tujuan beragama orang Aceh menemukan bentuknya sendiri. Dengan PUSA berdirilah sebuah gerakan, yang baik para ulama maupun kelompok-kelompok muda yang militan memperoleh tempatnya, sebuah gerakan yang dalam waktu yang paling pendek telah berhasil memperoleh pengikutnya dalam jumlah yang sangat banyak di seluruh daerah Aceh.

Gerakan PUSA atau P(ersatuan) U(lama) S(eluruh) A(ceh) didirikan di Bireuen dalam tahun 1939 di bawah naungan tertinggi Teuku Haji Chi' Muhamad Johan Alam Syah, kepala pemerintahan sendiri kenegerian Peusangan. Gerakan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mengimbangi gerakan Muhammadiyah dengan aliran beragamanya yang lebih modern dan asing bagi penghidupan orang-orang Aceh. Karenanya gerakan itu haruslah berdiri di bawah pimpinan seorang ulama Aceh yang sangat terkenal sebagai pengemban penghidupan beragama yang typis Aceh, fanatik dan orthodoks. Di dalam gerakan itulah para ulama diharapkan dapat menemukan suatu

organisasi, yang dalam kedudukan yang sama dan bermusyawarah akan memimpin, memurnikan dan membawa penghidupan beragama orang Aceh ke arah yang lurus. Nama baik daerah Aceh sebagai sramoe Makah (bhs. Aceh sramoe = serambi muka dan belakang dalam sebuah rumah Aceh) atau serambi Mekah, akan ditiupkan hidup baru oleh PUSA. Keanggotaannya tidak terbatas kepada para ulama saja. Setiap orang (Aceh) yang menyetujui tujuannya boleh menjadi anggotanya. Corak politik, apa lagi tujuan anti-Belanda, tampaknya asing bagi tujuan gerakan itu.

Seperti dikatakan di atas, persatuan itu didirikan di bawah naungan tertinggi seorang yang tidak lain dari pada Teuku Chi' Peusangan. Jaminan yang lebih baik dari kemurnian dasar organisasi itu sukarlah untuk dipikirkan. Bukankah di antara para kepala pemerintahan-sendiri Aceh Teuku Chi' Peusangan merupakan seorang tokoh yang paling baik? Orangnya bertubuh besar dan tinggi perawakannya, berumur lk. 50 tahun, berkepribadian yang menarik, pendeknya seorang tokoh pemerintahan dalam artikata yang sesungguhnya. Ia adalah seorang yang sangat setia kepada pemerintah Belanda, tanpa menutupi matanya akan kesalahan-kesalahan pemerintah ini dan merupakan penasihat yang dipercaya oleh berbagai-bagai residen di masa lalu. Ia memerintah kenegeriannya, salah satu yang terbesar dan terkaya dalam daerah Aceh, dengan segenap daya-upayanya dan dengan mempetaruhkan seluruh kepribadiannya sehingga mendatangkan kemakmuran bagi rakyat di dalam daerah itu. Bidang-bidang pertanian, pengairan, peternakan, pendidikan, kesehatan rakyat dan agama, semua itu mendapat perhatiannya. Tanpa membuang nilai-nilai ketimuran ia melihat sebagai suatu hal yang perlu untuk memberikan pendidikan Barat kepada anak-anaknya, sehingga seorang puterinya yang bungsu, bernama Cut Fatimah Zaurah, menjadi guru pada sekolah rendah Belanda (=Europese Lagere School) pemerintah di Sigli. Ia sangat dihormati oleh kolega-koleganya. Namun ia tidak memiliki watak untuk mencampuri pertentangan-pertentangan yang terjadi di antara sesama keturunan uleebalang, sehingga, di dalam berbagai-bagai masalah yang berhubungan dengan golongannya, ia tidak mengambil bahagian memimpin. Juga dalam "Hetze" terhadap Tuanku Mahmud tidak

=pula=

pula ia mengambil bahagian; ia menghormati kepribadian Tuanku Mahmud dan karenanya ia tidak termasuk ke dalam kelompok teman-teman Tuanku Mahmud yang loba yang jumlahnya tidak banyak itu di antara para ulèebalang.

Pimpinan organisasi itu berada dalam tangan tiga orang ulama muda terkenal yang, kendatipun mereka itu merupakan wakil-wakil golongan penghidupan beragama Aceh yang fanatik dan orthodoks yang typis, menginsafi keuntungan-keuntungan yang akan mereka peroleh dari hasil-hasil bentuk organisasi yang modern. Sebagai ketua pengurus besarnya bertindak Teungku Muhamad Daud Beureu'éh, seorang ulama, berumur 40 tahun, berasal dari kenegerian Keumangan dalam wilayah Sigli, yang berpengaruh besar hingga melampaui batas-batas kenegeriannya. Iapun menjadi ketua perkumpulan sekolah agama Jamiatuddiniyah di Blang Paséh yang sudah disebut sebelum ini. Hubungannya dengan kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Keumangan yang tua, Teuku Umar, tidak dapat dikatakan baik. Orangnya bertubuh semampai, berukuran sedang, sopan-santun dalam tindakannya terhadap orang-orang Eropah sehingga tidak menimbulkan sesuatu waham, bahwa ia, sebagai seorang ulama Aceh yang fanatik, akan mampu mengerahkan dan memimpin sebuah gerakan rakyat secara massal. Ia adalah seorang pembicara yang petah, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Aceh, tetapi hanya memahami tulisan Arab saja. Di samping dia dikenal lagi anggota-anggota pengurus besar Teuku Muhamad Amin dan Teungku Isma'èl Yacub, kedua-duanya mengambil tempat yang sangat penting dalam dunia keagamaan. Yang disebut pertama, Teuku Muhamad Amin, berumur lk. 35 tahun, berasal dari keturunan ulèebalang Pidie, kawin dengan janda Teuku Beureudan, kepala pemerintahan-sendiri Trieng Gadéng (wilayah Meureudu) dan menjadi penjual-obat di Sigli. Walaupun ia bukan seorang ulama dalam artikata yang sesungguhnya, namun kedudukannya dalam masyarakat dan kapasitasnya di bidang organisasi adalah berkat keturunannya saja dibandingkan dengan kepemimpinannya di bidang kerohanian. Sebaliknya yang disebut terakhir, Teungku Isma'èl Yacub yang masih muda itu, berasal dari Lhô' Sukôn, pernah bersekolah di Sumatera Barat dan Mesir dan sangat dikenal, terutama berhubung dengan publikasi-

=publikasinya=

publikasinya dalam masalah agama di Aceh dalam majalah "Penyedar".

Guna merealisasikan tujuannya, maka gerakan itu mencari bentuknya yang pertama ke dalam "Perguruan normal Islam" yang didirikan di Bireuen, sebuah sekolah agama menengah tempat membina guru-guru agama sesuai dengan azas perkumpulan itu. Di samping mata-mata pelajaran agama sejati, pada sekolah itu diajarkan juga sejarah, ilmu bumi, ekonomi dsb. Tenaga-tenaga pengajarnya yang terpenting pada sekolah agama modern ini, di samping Teungku Isma'êl Yacub dan Teungku Haji Abu Bakar, seorang ulama di Bireuen, dikenal pula seorang bernama Teungku Muhamad Nur, menantu Teungku Muhamad Daud Beureu'êh yang juga memperoleh pendidikan di Mesir dan beberapa tahun yang lalu disinyalir telah melontarkan ucapan-ucapan yang bermusuhan terhadap pemerintah di Idi dan selanjutnya Teuku Muhamad, berasal dari keturunan ulêebalang Peusangan yang beberapa tahun lamanya menempuh pendidikannya pada sekolah tinggi hukum di Betawi, akan tetapi tidak berhasil mencapai gelarnya.

Teuku Chi' Peusangan ketika diingatkan kepada tingkah-laku Teungku Muhamad Nur yang hampir-hampir dilupakan itu menyatakan, bahwa ia mampu menghadapinya.

Dalam waktu yang paling singkat gerakan baru itu tampaknya berkembang dengan baik dan memenuhi hasrat rakyat; para ulama, tua dan muda, baik yang lebih kolot maupun yang beraliran maju, menyatakan simpathi mereka dan berlomba-lomba memasuki gerakan tersebut. Di mana-mana, akan tetapi yang paling utama ialah di daerah Aceh Utara, berdirilah cabang-cabang gerakan itu laksana cendawan di musim hujan. Teungku Muhamad Daud Beureu'êh yang biasanya didampingi oleh Teungku Isma'êl Yacub, mengadakan perjalanan-perjalanan propaganda di seluruh daerah Aceh dan berhasil mencatatkan kemenangan-kemenangan yang gilang-gemilang. Bahkan di daerah Gayo dan Tanah Alas, tempatnya Muhamad Din yang disebut di atas, berusaha memperkuat pengaruhnya dan begitu juga di wilayah-wilayah Calang dan Meulabôh dalam daerah Aceh Barat, didirikan PUSA cabang-cabang PUSA. Hanya di wilayah-wilayah yang letaknya jauh ke Selatan dalam daerah Aceh Barat, dengan corak Minangkabau-Tapanulinya yang kuat dan dalam pandangan beragama

=lebih=

lebih banyak berorientasi ke Sumatera Barat, gerakan PUSA itu tidak banyak memperoleh pengikutnya. Kebanyakan kepala-kepala pemerintahan-sendiri mengambil sikap yang baik terhadap gerakan PUSA dan banyaklah di antara mereka itu yang menerima penghunjukan dirinya sebagai penasihat cabang-cabang setempat. Dengan ini diharapkan, bahwa usaha memajukan agama di bawah pimpinan dan pengawasan mereka itu mungkin sekali akan memainkan peranan yang sangat penting. Kepada Tuanku Mahmud yang sangat menaruh simpathi kepada gerakan ini, diserahi jabatan pelindung PUSA.

Juga dalam pers Indonesia gerakan PUSA yang menerbitkan majalah bulanannya sendiri, mendapat tempat yang menonjol serta memperoleh sambutan yang hangat. Kongres tahunan PUSA yang diadakan di Sigli dalam tahun 1940 mencapai sukses yang amat besar. Dari seluruh pelosok daerah Aceh sampai sejauh-jauhnya telah membanjir para utusan dan simpathisannya ke kongres itu.

Sikap gerakan tersebut terhadap pemerintah dan kelompok ulèebalang, kecuali pergeseran-pergeseran kecil, adalah baik sekali. Dalam sikapnya ke luar tidak sedikitpun menimbulkan waham, bahwa gerakan ini satu masa kelak akan merupakan wujud gerakan anti-pemerintah Belanda dan pembawa bencana Maut bagi kasta ulèebalang. Pada waktu pengangkatan Teuku Muhamad, putera kedua kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Keumangan, Teuku Umar, yang diturunkan dari jabatannya dalam tahun 1938 - seperti telah kita lihat dalam § yang lalu - Teungku Muhamad Daud Beureu'éh telah menyampaikan ucapan selamat atas nama seluruh rakyat kepadanya. Ketika dilakukan pengangkatan Teuku Panglima Polém Muhamad Ali sebagai Panglima sagi XXII mukim Seulimeum iapun turut hadir. Pada waktu pengangkatan Teuku Chi' Muhamad Basyah, menantu Teuku Chi' Peusangan, sebagai kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Keureutoe yang mencakup bahagian terbesar wilayah Lhô' Sukôn, Teungku Isma'èl Yacub telah menulis sebuah karangan sebagai menyambut peristiwa tersebut.(+) Teuku Muhamad Amin sebagai ketua

=kongres=

(+) Karangan dimaksud berjudul "Tiga belas tahun mengembara di hutan Pasè" yang mengisahkan pengembaraan Teuku Raja Sabi, abang tiri sepupu Teuku Chi' Muhamad Basyah, di hutan-hutan Pasè. Buku itu diterbitkan oleh sebuah toko buku di Bireuen.

A.B.

kongres PUSA di Sigli, pada waktu diadakan salah satu pertemuan besar di Kuta Asan, sebuah reruntuhan kubu pertahanan '' Aceh di masa lampau ta' jauh dari ibu-kota wilayah Sigli, telah menghentikan pembicaraan salah seorang pembicara, Mr. S.M. Amin, yang menjadi pengacara di Kutaraja, karena ia terlalu banyak menyinggung politik pemerintah.(+)

Punca aksi untuk memberontak itu tampaknya terletak pada gerakan pemuda PUSA. Sejak semula, agar kesadaran beragama pada golongan pemuda dapat ditingkatkan dan perkembangan serta hiburan mereka itu selalu berada dalam kerangka keagamaan, telah didirikan sebuah gerakan pemuda dengan nama PEMUDA PUSA, sebuah organisasi pemuda yang dalam tingkat-tingkat tertentu dapat disamakan dengan organisasi-organisasi pemuda Kristen yang besar di negeri Belanda. Dalam gerakan ini terdapat juga organisasi pandu, bernama KASYAFATUL ISLAM. Dengan segera pula terlihatlah di seluruh daerah Aceh pemuda-pemuda PUSA yang berpakaian seragam yang ketika dilakukan pengangkatan Teuku Panglima Polém Muhamad Ali, turut pula mengurus pengawalan kehormatan.

Watak organisasi pemuda itu pagi-pagi tampaknya sudah merupakan tempat berkembangnya benih-benih permusuhan terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan oleh tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintahan adat, sehingga unsur-unsur yang tertekan itu terpaksa menyingkir dan menemukan suatu wadah lain tempat pemuaskan perasaan mereka. Kwartir-induk K.I. berada di Idi, tempat tinggal pemimpin utamanya. Ia adalah Husin al Mujahid, berumur kira-kira 30 tahun - gelarnya saja sebagai "pejuang Allah" dalam jihad (bhs. Ar. "perang suci") pagi-pagi sudah memberi kesan ke arah itu - termasuk suatu kelainan di antara pemuda-pemuda Aceh yang militan. Juga ulama Teungku Abdul Wahab, guru agama di Seulimeum, berumur 45 tahun, yang segera telah mengambil tempat terpenting dalam gerakan itu, adalah seorang tokoh

=yang=

(+) Menurut keterangan Teuku Ali Keureukôn yang menghadiri kongres itu, pembicara yang dimaksud itu bukanlah Mr.S.M. Amin, tetapi Mr. Teuku Hanafiah. A.B.

yang sangat benci terhadap pemerintah Belanda.

Penempatan kwartir-induk K.I. di Idi mungkin sekali dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menjauhkan diri secara sadar dari pengawasan Teuku Chi' Peusangan. Kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Idi, Raye', Teuku Chi' Muhamad Daud Syah, adalah seorang yang tidak rapat sekali perhubungannya dengan kelahiran PUSA dibandingkan dengan Teuku Chi' Peusangan, sehingga pihak PUSA tidak perlu merasa khawatir mendapat pengawasan yang ketat dari padanya.

Demikianlah organisasi PUSA itu berangsur-angsur memperlihatkan aliran permusuhan yang tertuju baik kepada pemerintah Belanda maupun kepada kelompok ulèebalang sendiri. Dengan ini maka tibalah kita kepada gejala yang perlu diuraikan lebih mendalam lagi. Akhirnya: apakah yang telah menyebabkan baik kelompok ulama maupun kelompok pemuda maju ingin melepaskan diri mereka dari pemerintahan adat lalu membentuk sebuah front persatuan untuk menentang aparat-aparat pemerintahan adat keturunan ulèebalang? Untuk ini perlulah kitalebih dalam memasuki sejarah Aceh. Secara umum terdapat tiga pengumpil dalam perlawanan yang telah membuat peperangan Belanda di Aceh berwatak fanatik dan lama, yakni: para ulama, ulèebalang dan sultan. Dari ketiga ini, pengumpil ulamalah yang paling kuat, sedang pengumpil kesultanan yang paling lemah. Setelah pretende.-sultan berdamai, maka kelompok ulama (+) dan beberapa orang ulèebalang (++) telah meneruskan perlawanan itu; mereka itu - mana-mana yang tidak mau berkompromi dengan pemerintah Belanda - terpaksa harus dihancurkan satu demi satu.

=Baik=

(+) Di antara ulama-ulama itu tercatat keluarga Teungku Chi' di Tiro yang praktis telah mengorbankan seluruh anggotanya dalam menentang penjajahan Belanda di Aceh. (H.C. Zentgraaff dalam bukunya "Atjeh" (1938), hal. 16-43). A.B.

(++) Salah seorang di antara ulèebalang-ulèebalang itu adalah Teuku Bén Dawôt Pira', Lhô' Sukôn, yang oleh pengarang Zentgraaff disebut "één der onverzoenlijke hoofden die van geen onderwerping wilden weten" (=salah seorang pemuka rakyat yang tidak dapat didamaikan dan tidak kenal menyerah), Ibid. hal. 87. A.B.

Baik selama maupun sesudah berakhirnya peperangan Belanda di Aceh, kelompok ulèebalang berangsur-angsur telah berdamai dan karenanya dapatlah mereka itu dijadikan aparat pemerintahan-sendiri di bawah pemerintahan Belanda.

Sebaliknya dalam kelompok ulama, perasaan anti pemerintah Belanda itu terus saja malap, sehingga hanya menunggu suatu titik-balik dalam perhubungan untuk menimbulkan bencana yang amat besar bagi kasta ulèebalang setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang.

Sementara kelompok ulèebalang semakin terikat dengan pemerintah Belanda dalam suatu ikatan yang ramah, maka di dalam kelompok ulama perasaan benci terhadap pemerintah terus juga bertahan.

Antithese apakah yang dianggap paling wajar di antara kedua kelompok yang bekerjasama dalam peperangan Belanda di Aceh - dalam sejarah Aceh hal ini tidak lagi merupakan sesuatu yang baru - sehingga para ulama menganggap kelompok ulèebalang sebagai pengkhianat? Namun adalah keliru juga untuk menganggap, bahwa antithese tersebut harus menjadi sebuah konflik terbuka. Hanya keadaanlah yang yang telah memungkinkan meletusnya bencana yang dahsyat itu. Walaupun kita tidak dapat meramalkan jalannya sejarah itu, namun bukanlah suatu hal yang bukan tidak mungkin, bahwa, sekiranya peperangan dengan Jepang tidak meletus, antithese ini bukan tidak dapat dipecahkan melalui jalan evolusi dengan diadakannya "perombakan tata-cara pemerintahan" dari pada melalui jalan revolusi dengan kekerasan.

Jadi dapatlah dijelaskan, bahwa berbagai-bagai aliran tersebut, baik kelompok ulama yang biasa maupun yang maju, baik pemuda yang konservatif maupun yang nasionalistis modern yang ingin melepaskan diri mereka dari hubungan pemerintahan adat, telah menemukan wadahnya di dalam PUSA dalam mencapai tujuan mereka itu.

Sebaliknya kita akan berbuat kekeliruan untuk menganggap, bahwa seluruh aliran-aliran itu secara sadar telah membuat suatu perjanjian di dalam PUSA. Bahagian terbesar dari unsur-unsur yang disinggung sebelum ini telah bertindak secara tidak sadar.

Barulah kemudian setelah diteliti kejadian-kejadian di tahun-tahun terakhir terdapat kemungkinan untuk membuat suatu analisa, juga dari perkembangan-perkembangan sebelum terjadinya peperangan itu. Walaupun begitu, perkembangan-perkembangan tersebut sudah pula memperlihatkan gejala-gejalanya. Untuk beberapa orang ulama yang taat sudah jelas, bahwa gerakan dengan tokoh-tokoh pimpinan seperti Husin al Mujahid akan menjurus kepada jalan-jalan yang salah; perobahan namanya menjadi "Husin al Mudajal", si Husin dajal, tampaknya lebih sesuai untuk hal ini. Begitu juga perhubungan antara PUSA dengan para ulèebalang yang berpemandangan luas dan loyal lambat-laun menjadi dingin. Pengharapan mereka itu untuk memberi pimpinan dan mengambil kendali gerakan agama melalui PUSA telah mengecewakan mereka. Teuku Chi' Peusangan semakin menjauhkan diri, suatu sikap yang dicontohkan pula oleh banyak ulèebalang lain. Dalam pada itu pimpinan pengurus harian-nya sudah pula dipindahkan ke Sigli, tempat keadiaman Teungku Muhamad Daud Beureu'éh dan Teuku Muhamad Amin. Secara pasti dapat dianggap, bahwa perobahan watak gerakan PUSA itu, walaupun tadinya tidak terletak dalam maksud para promotornya, mendapat restu para anggota-anggota pengurus besar ini.

Di antara ulèebalang-ulèebalang yang tetap memberikan sokongannya kepada gerakan PUSA, tentu saja termasuk beberapa orang yang dalam hal-hal tertentu telah menjiwai sentimen PUSA. Mereka itu tidak mencegah, bahkan tidak dapat mencegah, bahwa dalam perjuangan akhir antara kedua kelompok itu telah menyalakan api-nafsu, bahwa perasaan benci PUSA tertuju kepada kasta ulèebalang, sedemikian rupa, tanpa perbedaan antara pribadi ulèebalang dengan anggota-anggota kasta tersebut. Juga Tuanku Mahmud tetap setia kepada gerakan PUSA dan ia melihat, secara sadar atau tidak, adanya kemungkinan untuk menciptakan organisasi itu bagi kepentingannya sendiri sehingga rakyat memandangnya lebih tinggi dari para ulèebalang.

Tentu saja orang akan bertanya-tanya: apakah sebabnya watak yang potensiil berbahaya pada organisasi itu tidak cepat-cepat dapat ditekan! Untuk ini terdapat banyak faktornya. Dalam pendahuluan tinjauan ini sudah terlihat, bahwa untuk memperoleh

keterangan-keterangan mengenai aliran-aliran yang tumbuh di kalangan rakyat, disebabkan tidak adanya P(olitieke) I(nlichtingen) D(ienst) (=dinas keterangan-keterangan politik), pemerintah harus menggunakan para ulèebalang sebagai penasihatnya, akan tetapi aliran-aliran tersebut - disebabkan dengan wataknya itu - semakin lama semakin melencit dari pengawasan para ulèebalang. Namun ada sebuah faktor lain yang terdapat dalam hal ini. Pihak Penguasa tidak memiliki sebuah aparat pusatpun untuk mengawasi para ulama di bidang kerohanian, politik dan sosial, apalagi untuk membimbing mereka itu. Memang, para ulèebalang adalah kepala agama di dalam daerah mereka, akan tetapi berhubung dengan antithese yang timbul berangsur-angsur antara para ulèebalang dengan kelompok ulama, maka pihak ulèebalang sedikit sekali dapat melakukan pengawasan terhadap ulama.

Yang lebih sangat dirasakan kekurangannya ialah adanya jabatan seorang penasihat agama yang dapat dipercaya seperti yang bertahun-tahun lamanya pernah dijalankan oleh Tuanku Raja Keumala, seorang keturunan sultan yang amat berpengaruh. Setelah beliau itu meninggal (+) institut penasihat agama itu dianggap tidak perlu dipertahankan lebih lama lagi sehingga hilanglah kesempatan bagi Penguasa untuk mengadakan kontak secara langsung dengannya untuk mengetahui aliran-aliran dalam kelompok orang-orang Aceh yang potensiil sangat berbahaya dan tidak kenal damai itu. Inipun merupakan sebuah analisa yang dengan amat mudah dapat diperbuat pada masa-masa belakangan se-kali, tetapi tidak pernah disadari sejak semula. Barulah pada saat-saat terakhir, ta' lama sebelum pendudukan Jepang, atas desakan Tuanku Mahmud yang berkali-kali itu, telah diangkat seorang keturunan sultan yang lain bernama Tuanku Abdul Azis, imam Mesjid Raya Aceh di Kutaraja, sebagai penasihat agama yang tidak resmi; untuk ini ia diangkat menjadi kepala penghulu pada Pengadilan Negeri di Kutaraja.

Pertimbangan-pertimbangan yang telah menyebabkan lahirnya usul Tuanku Mahmud itu pastilah bukan karena kekhawatiran

=yang=

(+) Tuajku Raja Keumala lahir di Keumala (Dalam) pada tanggal 1 Ramadan 1297 H. (1877) dan meninggal di Kutaraja pada tanggal 1 November 1930.

A.B.

yang timbul akibat dari sikap kelompok ulama dan adanya aliran-aliran yang timbul di kalangan mereka itu. Besar kemungkinan, bahwa dalam usul tersebut terdapat keinginan, agar jabatan yang pernah dijabat oleh Tuanku Raja Keumala dulu, kini perlu diisi kembali oleh seorang keturunan sultan yang lain. Sebaliknya Tuanku Abdul Azis yang tidak dapat disebut seorang ulama menurut ukuran yang dipergunakan di daerah Aceh, walaupun ia dikenal sebagai seorang além, tidaklah dapat menyamai penjabat sebelumnya yang amat ahli di bidang agama. Kendatipun sukar untuk memberikan penilaian mengenai kecakapannya dalam waktu yang sangat singkat, namun timbul pertanyaan apakah ia mempunyai kapasitas untuk menjalankan tugasnya itu? (+)

Berhubung dengan hal-hal yang disebut di atas, perlu dijelaskan, bahwa - seperti sudah kita melihatnya - keliru sekali untuk menganggap, bahwa watak yang potensiil berbahaya di dalam gerakan PUSA itu harus menjurus kepada perlawanan. Semua gejala itu memberi petunjuk, bahwa dengan menempuh jalan-jalan yang evolusioner, antithese itu akan dapat diatasi, sedang PUSA hanya merupakan katalisator untuk memperlekas proses pembaharuan itu.

Kini, sebagai penutup, akan dicantumkan beberapa catatan tentang hubungan antara PUSA dengan Muhammadiyah. Gerakan PUSA yang dilahirkan sebagai imbangan terhadap tendens agama yang modern dari Muhammadiyah, berusaha dalam waktu yang paling singkat untuk menjadi sebuah gerakan agama yang paling kuat dan berpengaruh di daerah Aceh. Jika kedua organisasi itu tadinya sedikit banyaknya bermusuhan terhadap satu dengan yang lain, akan tetapi semakin PUSA berkembang secara radikal, maka pertentangan-pertentangan itu lambat-laun telah menjadi reda dan tumbuhlah kedua gerakan itu menjadi sesuatu yang "konvergeer" dengan akibat, bahwa pada akhirnya terlihat adanya semacam kerjasama di antara kedua organisasi itu.

(+) Tuanku Abdul Azis meninggal pada tanggal 1 Juli 1961. Almarhum dikuburkan di pekuburan keluarganya di Lam Bada, Darussalam.
A.B.

§ 4. Keadaan perekonomian.

Jika kita memberikan ikhtisar mengenai posisi ekonomi daerah Aceh selama tahun-tahun terakhir sebelum pecahnya Perang Dunia kedua, sebagai menyambung angka-angka terbaru yang telah diumumkan pada halaman 141-248 dalam buku residen Jongejans (+), maka hal yang sangat menonjol ialah lajunya ekspor beras.

Jika dalam tahun 1938 dan tahun-tahun sebelumnya daerah Aceh hanya mampu mencukupi keperluannya saja, maka dalam tahun 1939 terdapat kelebihan ekspor sebanyak 5.600 ton, dalam tahun2 1940 dan 1941 masing-masing menjadi (dibulatkan) 24.000 ton dan 36.000 ton, sedang untuk tahun 1942 kelebihan ekspor itu ditaksir tidak kurang dari 45.000 ton.

Sejak masa gubernur Van Aken (++) telah diadakan usaha yang sekuat-kuatnya untuk mengintensifkan produksi beras, baik dengan cara seleksi bibit dan pengadaan irigasi, maupun dengan cara memperluas areal persawahan, dengan bekerjasama dan pertimbangan-pertimbangan Dinas Penerangan Pertanian Rakyat. Di masa residen-residen Jongejans dan Pauw aksi tersebut terus digiatkan dengan bertambah-tambah sukses lagi. Proyek-proyek mengenai perluasan daerah-daerah irigasi terus dikerjakan. Usaha untuk menjadikan Sumatera tidak tergantung dari impor di bidang bahan makanan menjadi semakin mendesak dan untuk itu diperoleh bantuan sepenuhnya dari departemen-departemen Urusan Ekonomi dan Lalulintas dan Pengairan. Kredit-kredit yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek-proyek irigasi itu yang sudah dibagi-bagi menurut

=tahun=

(+) "Land en volk van Atjèh, vroeger en nu", 1939.

(++) A.Ph.van Aken adalah gubernur Aceh yang terakhir; setelah dia hanya ada residen. Van Aken bertugas dari tahun 1933 sampai bulan Maret 1936. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 1 April 1936 sebagai anggota Dewan Hindia dan dikuburkan di pekuburan "Peucut" Kutaraja. A.B.

tahun_tahunnya telah disediakan dan dipercepat waktunya. Ahli pengairan Ir. W.F. Graadt van Roggen diangkat menjadi Kepala Pengairan.

Di antara proyek-proyek itu yang mencakup luas pengairan (dibulatkan) 40.000 H.A., disebut yang penting-penting di bawah ini:

No.	N a m a	Wilayah	Areal yang akan diairi
1	Arakundô Jambô Ayé	I d i Lhô' Sukôn	7.500 H.A. 12.500 "
2	Pasè	Lhô' Seumawè	6.000 "
3	Krueng Tuan	s.d.a.	1.500 "
4	Jeumpa	Bireuen	8.000 "
5	Proyek_proyek kecil lainnya	s.d.a.	4.500 "
		Jumlah.....	40.000 H.A.

Dengan siapnya proyek-proyek ini yang mendapat kemajuan pesat dalam pelaksanaannya itu, yang diperoleh kerjasama sepenuhnya dari para kepala pemerintahan-sendiri, diharapkan, agar sejumlah besar dari kekurangan beras di daerah Sumatera Timur yang setahunnya berjumlah 180.000 ton, dapat dicukupi.

Perkembangan pengangkutan beras ke Sumatera Timur yang sedemikian rupa itu telah menimbulkan berbagai-bagai masalah pula. Pertama-tama ialah masalah transportnya, selanjutnya masalah pengawasan ekspornya dengan memperhatikan pembagian yang merata dalam setahun dan yang terakhir masalah pengawasan mutunya, satu dan lain karena untuk konsumsinya, daerah Sumatera Timur hanya meminta beras giling mesin. Untuk mengatasi kesukaran-kesukaran ini, ekspor itu diatur secara lisensi. Jumlah ekspor beras itu setiap bulan dibagi kepada berbagai-bagai kilang-padi, terutama dengan perbandingan kapasitasnya. Perluasan dan pembaharuan mesin-mesin penggiling diawasi dan disesuaikan dengan keperluannya. Ekspor hanya boleh dilakukan dengan kereta-api dengan tarif khusus yang direndahkan untuk menjamin pengawasannya secara mudah. Kredit-kredit untuk perluasan jumlah gerbong A(tjeh) S(taats) S(poorwegen) (=kereta-api Aceh) telah dibenarkan dan dilakukan

=penetapan=

[illegible] harga beras.

penetapan harga maksimum beras.

Peraturan itu berjalan sangat baik dan dari semua pihak diperoleh kerjasama yang semaksimal-maksimalnya.

Ekspor beras untuk Sumatera Timur, terutama sekali berasal dari daerah Aceh Utara dan wilayah Idi dalam daerah Aceh Timur yang diekspor dengan kereta-api, dari wilayah Gayo Luös dan Tanah Alas yang diangkut dengan menggunakan auto-auto barang. Namun tidak seluruh kelebihan ekspor itu pergi ke Sumatera Timur. Pengeluaran dari daerah Aceh Barat - seperti ternyata dengan jelas - semata-mata ditujukan kepada keresidenan Sumatera Barat yang ekspornya dilakukan melalui laut. Ekspor-ekspor inipun dijalankan secara lisensi. Hanya daerah Aceh Besar, wilayah-wilayah Singkel, Simalur dan kenegerian-kenegerian bahagian Selatan Aceh dalam daerah Aceh Barat dan wilayah-wilayah Tamiang dalam daerah Aceh Timur sajalah yang tidak dapat atau hanya cukup untuk memenuhi keperluan beras dalam daerah sendiri.

Oleh karenanya jika usaha bersawah merupakan sumber penghasilan rakyat yang utama, maka di samping itu usaha-usaha perkebunan rakyat yang lain merupakan tambahan penghasilan yang bukan tidak penting pula. Di daerah Aceh Utara pertama-tama harus disebut usaha penanaman pinang; dalam tahun 1939 (berdasarkan angka-angka terakhir yang ada pada kita) Aceh telah mengekspor (dibulatkan) 25.000 ton dengan harga pk.rt. f 5,--/100 kg. Di daerah Aceh Timur terdapat usaha perkaretan rakyat dengan jumlah ekspor dalam tahun 1939 untuk seluruh daerah Aceh yang ditaksir kira2 1,3 juta kg seharga pk.rt. f 29,20/100 kg. Di daerah Aceh Barat terdapat usaha penanaman nilam; jumlah ekspornya dalam tahun 1939 ialah 115 ton minyak seharga pk.rt. f 950,--/100 kg. Penghasilan ekspor kopra, terutama yang terpenting dalam wilayah-wilayah Kutaraja dan Sabang dalam daerah Aceh Besar, wilayah Sinabang dan Pulau-pulau Banyak yang termasuk ke dalam wilayah Singkel dalam daerah Aceh Barat, di samping berbagai-bagai wilayah di dalam daerah Aceh Utara, berjumlah dalam tahun 1939 12.150 ton seharga pk.rt. f 3,50/100 kg, tetapi, disebabkan rendah harganya, kurang memuaskan. Ekspor yang kurang penting atau yang terbatas kepada kepentingan-kepentingan setempat saja ialah

=kentang=

kentang, kapok, lada, rempah-rempah dan tanaman palawija.(+)

Selain dari berbagai-bagai usaha pertanian rakyat, diperoleh juga penghasilan penting dari ekspor hewan. Juga dalam memenuhi kebutuhannya di bidang hewan-potong, daerah Sumatera Timur bergantung kepada daerah Aceh. Jumlah ekspornya (dalam tahun 1939) ke Sumatera Timur adalah 8.786 ekor sapi dan 7.069 ekor kerbau, terutama yang berasal dari daerah Aceh Utara dan wilayah Seulimeum dalam daerah Aceh Besar. Di samping itu dalam tahun tersebut ekspor kambing ke Penang berjumlah hampir 10.000 ekor. Ekspor kayu dan hasil-hasil hutan berasal terutama dari daerah Aceh Timur dan wilayah-wilayah Singkel dan Simalur dalam daerah Aceh Barat. Terakhir sekali kita meminta perhatian mengenai masalah perikanan dan pembuatan garam sebagai sumber-sumber penghasilan rakyat serta ekspor Aceh/di bidang telur itik asin dan ayam-potong yang diangkut ke Sumatera Timur dengan menggunakan gerbong-gerbong kereta-api Aceh yang khusus diperbuat untuk maksud tersebut. /yang terpenting

Pertanian budidaya (=ondernemingslandbouw) yang disinggung di sini secara selintas-kilas hanya terdapat dalam wilayah-wilayah Temiang dan Langsa; di sana terdapat kebun_kebun getah dan kelapa sawit yang luas yang termasuk ke dalam daerah perkebunan di Sumatera Timur, wilayah-wilayah Meulabôh dan Singkel dalam daerah Aceh Barat juga dengan perkebunan-perkebunan getah dan kelapa sawit dan wilayah Takèngon dengan perusahaan damar dan terpentin negara, berbagai-bagai kebun kopi yang besrr dan kecil, di samping kebun-kebun teh. Wilayah2Idi (dengan kebun-kebun getah) dan Lhô' Sukôn (dengan kebun-kebun getah dan sisal) hanya memiliki beberapa buah kebun saja. Akhir tahun 1939 di seluruh daerah Aceh terdapat 133 bbah usaha-usaha perkebunan budidaya dengan luasnya masing-masing kurang dari 2.000 H.A. dan 17 buah dengan luasnya masing-masing 2.000 H.A. atau lebih.

Seluruh areal yang ditanami dalam tahun tersebut berjumlah: getah 34.060 H.A., kelapa sawit 11.325 H.A., kopi 2.745 H.A., sisal 1.620 H.A. dan teh 850 H.A.

Permintaan-permintaan erpah (=erfpachtsaanvragen) sejumlah 22.018 H.A., terutama diterima dari N.V. H.V.A. utk daerah Aceh =Barat=

(+) Lihat pada halaman 34.

Barat dan wilayah Lhô' Seumawè dan dari N.V. Société Financière des Caoutchoucsajuga untukdaerah Aceh Barat, sedang dalam penyelesaiannya. Akhirnya disebut di sini mengenai usaha-usaha pertambangan yang terdapat dalam wilayah Temiang (pemboran BPM di Rantau), Langsa (pemboran BPM Perlak), Lhô' Seumawè (pemboran NKPM) dan Meulabôh (tambang emas NV. Marsman).

Berapa besar artinya usaha-usaha di bidang perkebunan dan pertambangan itu bagi kemakmuran rakyat . . tidaklah perlu dijelaskan lebih lanjut. Hanya perlu dikemukakan di sini mengenai rencana-rencana jangka panjang dari perusahaan damar dan terpentin negara yang dalam tempoh tidak sampai sepuluh tahun - di bawah pimpinan yang kuat dari tuan H. Oosterling - telah berkembang dari sebuah perusahaan percobaan menjadi sebuah perusahaan nomor satu dengan produksinya dalam tahun 1941 sebanyak 10.632 ton bahan murni dibandingkan dengan 2.143 ton dalam tahun 1936, 518 ton dalam tahun 1931 dan 126 ton dalam tahun 1926. Dari 10.632 ton bahan murni itu dengan harganya franco pelabuhan angkut (Lhô' Seumawè) sejumlah 9,77 sen/kg, terdapat 7.910 ton damar, 2.410 ton terpentin dan 312 ton balsem yang "gedecanteerd" (=sudah dibersihkan).

Jumlah areal pohon tusam (pinus merkusii) di Takèngon (dibulatkan) adalah 70.000 H.A., di antaranya 40.000 H.A. sedang diperkebunkan dan 35.000 H.A. telah dapat disadap. Walaupun dilakukan perluasan produksi tanaman tersebut, namun masih terdapat kemungkinan untuk memperoleh daerah-daerah pelemparannya; produksi damar belum lagi mencukupi keperluan dalam negeri (batik Jawa); terpentin terutama dikirim ke negeri Belanda, akan tetapi ketika negeri itu diduduki Jerman, maka bahan tersebut telah sangat digemari oleh Australia. Dalam rangka penyediaan apa yang dinamakan "rencana 25 juta" telah dikeluarkan kredit pertama untuk persiapan-persiapan pendirian paberik kertas dalam wilayah Idi di kuala Krueng Jambô Aÿé yang berpucuk di Takeèngon; sungai itu akan dipergunakan untuk mengalirkan kayu. Dalam hubungan ini selanjutnya telah direncanakan untuk mengeksploitir areal pinus dalam wilayah Gayo Luös dan Tanah Alas; di sana terdapat lk. 30.000 H.A. yang akan dieksploitir dan akan disambung dengan

=kabelbaan=

"kabelbaan" dengan daerah pengaliran Krueng Jambô Aye.

Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan, bahwa keadaan perekonomian di dalam derah Aceh dapat disebut baik dengan perspektif-perspektifnya yang luas untuk berkembang lebih lanjut. Usaha pertanian, sesuai dengan peribahasa Aceh lama pangulèe hareukat, meugoe (=pertanian adalah usaha yang utama), tetap merupakan dasar penghasilan rakyat yang terpenting, ditambah lagi dengan penghasilan-penghasilan sampingan lainnya untuk menjamin kemakmuran rakyat.

Menurut perhitungan Kepala Dinas Penerangan Pertanian Rakyat yang terakhir, Ir. A.L.W. Seyffardt, yang mempunyai saham yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Aceh di tahun-tahun terakhir, penghasilan rakyat yang tertinggi adalah di daerah Aceh Barat dan yang terendah di daerah Aceh Besar. Sesungguhnyalah demikian, daerah Aceh Besar merupakan tempat yang lemah dalam perekonomian Aceh. Daerah itu hampir-hampir ta' dapat memenuhi keperluannya sendiri di bidang beras; sebagai penghasilan sampingan, terutama dalam wilayah Kutaraja dengan usaha kelapanya dan dalam wilayah Seulimeum dengan usaha peternakannya, keadaan perekonomian untuk daerah tersebut adalah kurang menguntungkan.

Satu-satunya cara pemecahan dalam hal ini ialah pengadaan pengairan di lembah Aceh Besar secara besar-besaran seperti telah dikemukakan dengan segala macam alasan di dalam Dewan Rakyat oleh Tuanku Mahmud. Mengingat biaya-biaya yang diperlukan untuk itu sangat besar jumlahnya dibandingkan dengan keuntungan ekonomisnya, maka untuk sementara rencana tersebut telah ditangguhkan.(++)

=Namun=

Dari halaman 32: Tanaman lada yang pernah berkembang dengan sebaik-baiknya itu, disebabkan oleh penyakit lada serta rendahnya harga lada, kini sudah hampir hilang semuanya. Untuk ini, kepada peminat saya mempersilakan untuk membaca "Atjèh" karya J. Kreemer, jilid I, hal. 477 dst. Dalam tahun 1939 jumlah ekspornya tercatat hanya 833 ton dengan harga pk.rt. f 7,--/100 kg. P.

(++) Dalam "werkprogramma" Kepala Dinas Penerangan Pertanian Rakyat Aceh tahun 1939-1940 (hal. 3), Ir. A.W.L. Seyffardt menyebut pembiayaan proyek Krueng Jreue itu dengan istilah 'millioenfonds' (=dana jutaan) dan ditaksir akan menelan biaya tidak kurang dari 25 juta guldens!! A.B.

Namun demikian dikandung maksud untuk menempatkan "keuntungan politik" di atas "keuntungan ekonomi" dan untuk memberikan prioritas di dalam perkembangan serta pelaksanaan rencana tersebut.

Akhir sekali beberapa penjelasan mengenai rencana irigasi yang berhubungan dengan rencana kolonisasi orang-orang Jawa. Proyek-proyek irigasi yang disebut pada pendahulu § ini tidak memberi tempat yang luas untuk kolonisasi orang-orang Jawa berhubung sebagian besar dari areal yang diairi itu sudah ditempati oleh petani-petani Aceh. Di samping proyek-proyek itu terdapat juga beberapa proyek-proyek irigasi lain untuk kolonisasi orang-orang Jawa yang sedang dipelajari. Sebagai proyek terpenting saya sebut di sini rencana irigasi dan kolonisasi untuk daerah perbatasan wilayah kenegerian-kenegerian bahagian Selatan Aceh (Trumon) dan Singkel.

Usaha untuk memodernisasikan perhubungan tetap merupakan syarat yang sangat mendesak. Pelaksanaan hal inipun akan dipaksakan oleh peperangan. Investasi-modal yang tidak sedikit jumlahnya untuk pembaharuan dan perbaikan materiil kereta-api Aceh yang selama peperangan menjadi berkurang sekali, kini akan menimbulkan pertanyaan apakah tidak lebih baik untuk memodernisasikan apa yang dinamakan "jalan raya" dari Kutaraja ke Medan. Juga untuk ini diperlukan biaya yang berjumlah sampai beberapa juta.

Usaha untuk meneruskan pembuatan jalan sepanjang Aceh Barat dari Rundéng dalam wilayah Singkel ke Sidikalang dalam keresidenan Tapanuli, sudah dimulai. Untuk perbaikan perhubungan yang sangat penting ini yang menghubungkan daerah Aceh Barat secara langsung ke dataran tinggi Karo dan melepaskannya dari isolasi, sudah disediakan biaya sejumlah f 750.000,-- dari dana karet. Dengan sendirinya untuk pelaksanaan pembuatan jalan-jalan ini akan diberikan prioritas yang utama sekali dibandingkan dengan pembuatan apa yang dinamakan "jalan transversaal" Sigli-Meulabôh. Seperti diketahui, pembuatan jalan dari Sigli melalui Lammeulo dan Tangsé sampai ke Geumpang (98 km.) sudah banyak dicapai kemajuannya dan di bahagian Meulabôh sampai ke Kuala Tutut (60 km.) sudah diperbaiki seluruhnya untuk kepentingan tambang emas. Biaya-biaya untuk pelaksanaan bahagian jalan yang kekurang-

=an=

an itu (47 km.), pada ketika itu ditaksir sejuta guldens. Penyelesaian perhubungan yang disebut terakhir itu, baik dari sudut ekonomi maupun pertimbangan politik, haruslah diberikan prioritasnya.

Akhir sekali dijelaskan, bahwa jaringan jalan-jalan perusahaan damar dan terpentin negara di dalam wilayah Takèngon yang sudah diteruskan jauh ke lembah Isa', sudah sebagian besar pula yang disiapkan arah ke Blangkejerèn. Juga dikandung maksud untuk meneruskan jaringan jalan-jalan dari Takèngon ke dataran tinggi Tanah Karo, akan tetapi hal ini, dengan sendirinya, tergantung kepada keadaan selanjutnya yang akan ditampung oleh perusahaan ini, terutama sekali timbul pertanyaan: pabila dan bagaimana areal pohon tusam di dalam wilayah Gayo Luös akan dieksploitir.

---

§ 5. Perkembangan budaya.

Mengenai perkembangan pendidikan di daerah Aceh, setelah diumumkan angka-angka terbaru dalam buku residen Jongejans (hal. 249-267) (+) akan saya singkatkan saja.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa perkembangan pendidikan berangsur-angsur telah menjadi baik setelah membaiknya keadaan keuangan sejak tahun 1934. Baik sekolah-sekolah desa (=volksschool dengan 3 kelas) maupun sekolah-sekolah sambungan (=vervolgschool dengan 5 atau 6 kelas) dan sekolah-sekolah Belanda Indonesia (=Hollands Inlandse School dengan 7 kelas) mengalami penambahan yang terus-menerus.

Akhir tahun 1939 berjumlah sekolah-sekolah pemerintah dan kenegerian di dalam daerah Aceh: 1 sekolah M.U.L.O., 4 sekolah rendah Eropah (=Europese Lager School), 1 sekolah Ambon khusus, 8 sekolah H.I.S., 45 sekolah sambungan, 348 sekolah rakyat dan 1 sekolah tukang. Sejak itu terus juga terdapat penambahannya.

Masa perkembangannya itu, dibandingkan dengan kehausan akan pendidikan, tidak serempak jalannya. Pelaksanaan "rencana

(+) "Land en volk van Atjèh, vròeger en nu". =menenhuskan=

menembuskan" (=doorbrekingsplan) yang dilahirkan selama tahun-tahun peperangan di bidang pendidikan, oleh karenanya mendapat sambutan yang hangat sekali. Sesuai dengan rencana ini, maka dilakukanlah penelitian yang teratur secara masing-masing wilayah serta ditetapkan pengadaan pendidikan untuk setiap wilayah, sehingga dalam beberapa tahun akan hilanglah buta-huruf. Sayang sekali rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan disebabkan oleh meletusnya peperangan dan akan diperlukan waktu yang bertahun-tahun lamanya untuk menebus kembali kerugian yang telah ditimbulkan oleh pendudukan Jepang itu.

Salah satu hasil dari perhatian masyarakat yang semakin meningkat itu, terutama di bidang pendidikan M.U.L.O. dan H.I.S. ialah timbulnya golongan yang lebih berpendidikan, sehingga memungkinkan diadakannya seleksi dalam penerimaan tenaga-tenaga pegawai untuk berbagai-bagai jabatan pemerintahan dan swasta. Sistim penggajian tenaga-tenaga muda di kantor-kantor pemerintah yang benar-benar tidak memadai itu, di mana seorang klerk yang berijazah M.U.L.O. menerima penghasilannya kurang dari seorang pembantu rumah-tangga, telah menjadikan faktor penghalang dalam memperbaiki mutu pegawai dinas_dinas pemerintah. Walaupun demikian, di masa-masa belakangan ini telah berhasil juga untuk dilakukan peremajaan tenaga-tenaga di kantor-kantor pemerintahan dengan tenaga-tenaga yang terdidik dan untuk ini lebih diutamakan tenaga-tenaga bangsa Aceh. Juga pada dinas kereta-api dan kepolisian lebih diperbesar lapangan bagi tenaga_tenaga bangsa Aceh. Dalam § 2 bab ini sudah kita lihat, bahwa sangat perlu sekali bagi pemerintah untuk menaruh perhatian terhadap masalah ini.

Di samping pendidikan pada sekolah-sekolah rakyat, sambungan, H.I.S. dan M.U.L.O, pihak pemerintah menaruh perhatian juga untuk memberikan pendidikan menengah kepada pemuda_pemuda bangsa Aceh. Sudah ada pemuda-pemuda Aceh yang telah menempuh sekolah-sekolah kedokteran (N.I.A.S.), hukum dan sekolah-sekolah pemerintahan dalam negeri (M.O.S.V.I.A.) atau berbagai-bagai sekolah tinggi dan menengah di negeri Belanda. Rumah bekas kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Peureula' Teuku Chi' Muhamad Thayéb di Betawi, yang telah disebut dalam bab ini, yang putera-pute-

=ranyanya=

ranya menempuh pendidikan tinggi baik di negeri Belanda maupun di Jawa, merupakan pusat intelektuil bagi pemuda-pemuda Aceh yang belajar di sana. Juga Tuanku Mahmud sering berkunjumg ke mari jika ia menghadiri sidang-sidang Dewan Rakyat dan dengan jalan begitu dapat pula ia mengadakan kontak dengan pemuda-pemuda bangsa Aceh yang sedang belajar itu. Dengan tegas perlu dinyatakan di sini, bahwa dari pihak Teuku Chi' Peureula' tidak pernah diketahui adanya pengaruh untuk membenci pemerintah.

Untuk menempatkan tenaga-tenaga yang berpendidikan tinggi dan menengah inipun terdapat faktor-faktor penghalang. Namun kebijaksanaan pemerintah yang baru sudah pasti akan memberikan kemungkinan yang besar untuk menembus kesukaran-kesukaran itu. Untuk tenaga-tenaga dokter Aceh, baik pada M(ilitair) G(eneeskundige) D(ienst) maupun pada D(ienst) V(olks) G(ezondheid), disediakan lapangan yang cukup luas. Begitu juga halnya untuk menempatkan ahli-ahli hukum bangsa Aceh, baik dalam rangka korps pemerintahan yang baru maupun untuk bidang-bidang hukum yang lain, terdapat kemungkinan yang besar.

Dalam § 2 bab ini sudah dijelaskan, bahwa susunan penghidupan masyarakat Aceh menjurus sedemikian rupa sehingga pendidikan menengah dan tinggi hanya terbatas pada golongan-golongan bangsawan Aceh saja dan sedikit sekali terdapat golongan-golongan di luarnya yang berpendidikan menengah atau tinggi.

Di samping bantuan pemerintah maupun kas-kas kenegerian, di daerah Aceh terdapat dua buah dana-studi untuk membantu pemuda-pemuda pelajar. Dana tertua dari dana-dana itu adalah "Atjeh Studiefonds" (=dana pelajar Aceh) di Kutaraja yang di tahun-tahun terakhir dipimpin oleh Teuku Nya' Arif, Panglima sagi XXVI mukim. Yang termuda tetapi yang paling kuat yang diberi nama "Studiefonds untuk Aceh" (=S.U.A.) berkedudukan di Medan dan dipimpin oleh seorang yang amat keras hati bernama Mr. Teuku Muhamad Hasan, ajun-referendaris di kantor Kepala Daerah di Medan. Ia adalah putera tertua kepala pemerintahan-sendiri kenegerian Pineung dalam wilayah Sigli yang mencapai gelarnya pada Universitas Kerajaan di Leiden; di sana, berkat keinginan belajarnya yang menyalanyala maupun perhatiannya untuk daerah sendiri dan bidang adat,

ia telah memperoleh penghargaan dari semua mahagurunya. Setelah menammatkan pendidikannya itu ia ditempatkan dalam dinas pemerintahan; perhatiannya tertuju kepada perkembangan-perkembangan di dalam daerah Aceh, akan tetapi ia tetap menjaga, agar tidak terlibat di dalam setiap masalah politik yang berkenaan dengan Aceh. Kepribadiannya itu pastilah telah membuat "dana pelajar" yang didirikannya di Medan dalam tahun 1939 itu memperoleh kepercayaan yang besar, sehingga di seluruh daerah Aceh terdapat cabang-cabangnya.

Dalam hubungan ini perlu pula dinyatakan mengenai tokoh Aceh lain yang bertempat tinggal di Medan yang sejak diadakannya pembangunan di bidang pendidikan di Aceh telah mempunyai saham yang tidak sedikit, yaitu kepala penilik sekolah pendidikan bumiputera (=hoofdschoolopziener bij het inlands onderwijs) di Medan bernama Aboe Bakar yang jasa-jasanya telah dihargai pemerintah dengan diserahkannya bintang kerajaan kepadanya. Perlu dicatat, bahwa Aboe Bakar merupakan salah seorang putera Aceh yang tidak berasal dari keturunan uleebalang.(+)

Untuk lengkapnya perlu dikemukakan lagi di sini mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di bahagian lain di Nusantara tentang adanya kelompok-kelompok pemuda intelek yang semakin membesar seperti telah dijelaskan sebelum ini. Dengan ini saya

=maksudkan=

(+) Kendatipun demikian, Aboe Bakar yang dimaksud itu - menurut pengetahuan penterjemah - yang meninggal sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan propinsi daerah istimewa Aceh di Kutaraja, bukan pula seorang yang berasal dari golongan rakyat jelata seperti yang mungkin disangka oleh Dr. Piekaar karena ia tidak menggunakan gelar "teuku" di muka namanya.

Adik almarhum bernama Nya' Umar yang pada awal kemerdekaan Indonesia menjabat Kepala Kemakmuran daerah Aceh di Kutaraja dan oleh Dr. Piekaar disebut sebagai "de uiterst bekwame adjunct-landbouwconsulent aan het hoofd van de afdeling economise zaken (=seorang "adjunct-landbouwconsulent" yang sangat ahli selaku kepala urusan perekonomian) (hal. 246). Nya' Umar adalah korban penculikan yang pertama di Kutaraja dalam bulan Desember 1945 sekembalinya dari menghadiri sidang ekonomi pada suatu malam di tempat kediaman Tuanku Mahmud. (bandingkan juga "Memoir (catatan) T.M.A. Panglima Polim" hal. 13 jo. "Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polém" (terjemahan J.H.J. Brendgen) hal. 13-14).

A.B.

maksudkan adanya kesukaran-kesukaran yang berhubungan dengan penyesuaian-penyesuaian ke dalam masyarakat yang timbul pada pemuda-pemuda yang tidak lagi mau terikat dengan hubungan adat asli, suatu gejala yang tampak di seluruh dunia dalam suatu masa sejarah. Timbulnya - untuk memudahkan saya sebut saja - "golongan ketiga" itu telah menempatkan pemerintah - terutama untuk daerah Aceh - dalam suatu masalah yang sampai sekarangpun belum dapat dipecahkan.

Telah saya jelaskan sebelum ini, bahwa kebijaksanaan pemerintah telah mengalami kegagalan dalam menghadapi hal ini dan kita melihat, bahwa hanya dengan melakukan pendemokrasian dalam sistim pemerintahan adat yang turun-temurun itu sajalah dapat diperoleh jalan keluar yang memuaskan. Juga dalam hal ini akan ternyata, seperti seringkali terjadi dalam sejarah, walaupun itu disebabkan oleh keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan bencana yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu, bahwa kebijaksanaan politik, yang secara tidak disadari untuk menempatkan "golongan ketiga" itu secara progressif ke dalam aparat-aparat pemerintahan dan dalam hal-hal tertentu ke dalam pemerintahan adat yang tradisionil itu, akan merupakan politik yang tidak memahami kehendak zaman dan akhirnya akan menempuh jalan-jalan yang revolusioner yang sebenarnya dapat dijalankan melalui jalan-jalan yang evolusioner.

Ada sebuah hal lagi yang akhirnya perlu diperhatikan, yakni pendidikan agama. Seperti halnya di tempat-tempat lain, juga di daerah Aceh pendidikan agama dan pendidikan umum merupakan dua bidang yang berlain-lainan yang diurus oleh lain-lain instansi. Pemerintah dengan cermat sekali mengurus pendidikan umum, tetapi melepaskan urusan pendidikan agama bagi pemuda-pemuda kepada badan-badan yang sejak dahulu telah menampung persoalan tersebut. Akibat dari politik yang sejak semula bukan tidak tepat itu ialah, bahwa keinginan pendidikan agama yang meluap-luap itu tidak pula dapat dimanfaatkan untuk mempopulerkan pendidikan rakyat.

Dalam banyak hal sekolah-sekolah pemerintah itu tetap merupakan sistim yang asing bagi suasana kampung yang berdiri

di samping sekolah agama yang memang menjadi darah dan daging masyarakat kampung. Penghapusan dualisme ini dengan jalan memasukkan pendidikan agama ke dalam rencana pelajaran sekolah-sekolah rakyat, mungkin sekali - walaupun terdapat kesukaran-kesukaran di dalamnya - merupakan sebuah cara pemecahannya. Percobaan pertama ke arah ini sudah dimulai dengan menyediakan lokalitas-lokalitas sekolah rakyat di sana sini untuk pendidikan agama.

Jika hal-hal yang disebut sebelum ini berhubungan dengan apa yang dinamakan "pendidikan agama tingkat rendah", maka dalam § 3 bab ini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan, bahwa, terutama apa yang dinamakan "sekolah-sekolah agama menengah", itu selalu saja merupakan sarang propaganda anti-Belanda.

Sudah saya jelaskan, bahwa dalam golongan ulama tetap menyala semangat anti-Belanda dan, disebabkan bertambah suburnya antithese antara para ulèebalang dengan ulama, maka para ulèebalang itu, kendatipun mereka merupakan kepala agama dalam daerah mereka sendiri, dalam banyak hal tidak cukup mampu untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan gerakan-gerakan agama, apa lagi untuk membimbingnya!

Hal yang lebih mempersukar lagi untuk mengenal perkembangan ini ialah karena sebagian besar para ulèebalang itu justru menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan agama! Banyak di antara mereka itu merasa mendapat kehormatan jika di dalam daerah mereka terdapat satu atau lebih sekolah-sekolah agama itu, yang - berkat para ulama terkenal yang memberi pelajaran pada sekolah-sekolah itu - turut pula mengharumkan nama para ulèebalang itu. Para ulama itu - seperti telah kita lihat - di antaranya ada yang memperoleh pendidikan di Mesir, yang lainnya pula di Sumatera Barat atau di tempat-tempat lain dalam daerah Aceh, selalu pula secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi berpaham anti-Belanda, suatu hal yang turut membuat suasana tambah berbelit-belit. Oleh karena setiap kritik itu akan memukul mereka kembali, makamungkin sekali, bahwa inipun menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan dan bimbingan mereka terhadap keadaan pendidikan sekolah-sekolah itu menjadi sia-sia. Dalam hal ini kita bertemu dengan contoh yang disebut dalam § 3 bab

=ini=

ini mengenai penempatan-penempatan politik dari beberapa orang tenaga pengajar pada sekolah agama di Bireuen yang dilindungi oleh Teuku Chi' Peusangan.

Sebuah pengawasan yang baik terhadap pendidikan ini yang dilakukan oleh seorang ahli yang benar-benar dapat dipercaya dalam sebuah instansi yang merdeka dan berada di bawah para uleebalang, mungkin sekali dapat memberitahukan setiap waktu kepada pemerintah mengenai gejala-gejala yang lahir pada banyak sekolah-sekolah itu.

---

§ 6. Peperangan dengan Jerman.

Pecahnya peperangan dengan Jerman yang telah membawa perkembangan yang memuaskan keadaan politik, ekonomi dan kebudayaan, pada umumnya tidak menimbulkan reaksi dalam artikata yang tidak memuaskan. Malahan sebaliknya, pecahnya peperangan, seperti telah kita lihat terlebih dahulu, merupakan dorongan bagi pembangunan yang lebih cepat dalam bermacam-macam bidang, misalnya dalam bidang pendidikan dan irigasi. Berita mengenai pendudukan negeri Belanda oleh Jerman telah melahirkan pernyataan-pernyataan ketaatan yang serta-merta di seluruh Aceh. Malahan hampir tidak masuk akal, bahwa nasional-sosialisme dengan diskriminasi ras yang meramalkan tidak banyak mendatangkan kebaikan bagi dunia Timur, akan dapat memperoleh banyak simpathi di dalam masyarakat Indonesia. Tidaklah mengherankan, juga di daerah Aceh, rakyat Indonesia ikut-serta dalam menghadapi ketegangan peperangan dan memberikan kerjasamanya dalam pengumpulan wang untuk keperluan dana-dana "spitfire" dan dana-dana peperangan lainnya, seperti juga dalam pasukan-pasukan penjagaan kota dan negeri, organisasi penjagaan bahaya udara, dsb.nya. Di dalam aksi pengumpulan sumbangan-sumbangan itu, maka Aceh dengan sumbangannya berupa sebuah "spitfire" dan sebuah brengun-carrier sama sekali tidak merupakan gambaran yang buruk dan terasa amat menyenangkan hati, bahwa kelompok-kelompok masyarakat Indonesia dan Cina telah memberikan pula sumbangan dalam jumlah yang cukup besar. Di antara kelompok masyarakat Aceh terdapat keinginan yang besar untuk menjadi pasukan-

=pasukan=

pasukan penjagaan kota dan negeri, meskipun sifat organisasi-organisasi ini , terutama yang sampai ke ibu-kota-ibu_kota dan kewedanaan serta perkebunan-perkebunan paling banyak melibatkan unsur-unsur yang bukan-Aceh. Mengenai permohonan para ulèebalang untuk mengorganisir kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri di dalam rangka ini tidak dapat dikabulkan. Tindakan-tindakan istimewa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi yang kelayakan dan keperluannya dapat dipahami, tidak menemukan sesuatu perlawanan.

Juga gambaran ancaman yang semakin lama semakin jelas dalam hal peperangan dengan Jepang, pada umumnya tidak membawa sesuatu perobahan karena perasaan yakin mengenai akan ikut-sertanya Amerika bilamana terjadi perang dengan Jepang dan negara-negara sekutu dianggap cukup kuat untuk dapat menghadapi serangan tentara Jepang. Pada awal bab ini telah saya nyatakan, bahwa penghapusan sejumlah garnisun-garnisun yang ada hubungannya dengan ini rupa-rupanya telah tidak menimbulkan sesuatu reaksi pada rakyat Aceh dan hanya beberapa pernyataan yang terpisah-pisah memberi dugaan, bahwa penghapusan tersebut pada beberapa orang tertentu telah membangkitkan kembali harapan mereka, bahwa kekuasaan Belanda akan berakhir. Juga lebih lanjut ternyata, bahwa hanya satu kejadian telah terjadi berupa agitasi yang memusuhi pemerintah dan itu terjadi di Garôt dalam wilayah Sigli, yang dalam hubungan ini tiga orang Aceh telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Musapat (=pengadilan bumiputera). Bukannya tidak menarik perhatian untuk disampaikan dalam hubungan ini, bahwa di antara tiga orang tersebut setelah Jepang kalah, dua orang ikut-serta dalam gerakan pemuda ekstremis, tetapi yang ketiga malahan dikatakan telah dibunuh oleh para pemuda.

Mengenai akibat-akibat tindakan dalam keadaan perang tersebut masih perlu disebut mengenai suatu bidang yang lain, yaitu persediaan pengobatan untuk rakyat Indonesia. Hingga saat ini kegiatan Dinas Kesehatan Rakyat di Aceh hampir seluruhnya dilakukan oleh para Perwira kesehatan di samping tugas kesehatan militer mereka sendiri. Hanya beberapa orang dokter bumiputera terdapat di samping itu yang bekerja khusus untuk tujuan-tujuan

Dinas Kesehatan Rakyat. Penghapusan pelbagai pos militer seperti juga penempatan keperluan peperangan yang diharapkan dari Perwira kesehatan yang masih tertinggal menyebabkan perluasan formasi Dinas Kesehatan Rakyat menjadi amat perlu. Dalam hubungan ini, maka empat orang dokter Indonesia ditempatkan di keresidenan ini. Melihat pengalaman-pengalaman di Aceh Besar dengan dokter Indonesia Mohamad Mahjoeddin yang sangat berkemampuan, seorang Minangkabau (sebenarnya: orang Tapanuli Selatan, pent.), yang karena pengetahuannya yang mendalam mengenai bahasa dan kehidupan rakyat Aceh dan karena beragama Islam memperolah kepercayaan yang cukup besar dari rakyat Aceh yang demikian eksklusip, malahan dari wanita-wanitanya, maka dapatlah diharapkan akan diperoleh hasil-hasil yang baik. Untungnya dengan kehadiran mereka, sesudah para dokter Belanda diinternir, ternyata dengan obat-obatan yang amat sedikit tersedia masih terdapat kemungkinan untuk memenuhi sekedarnya kebutuhan-kebutuhan pengobatan rakyat.

---

§ 7. Ringkasan.

Bilamana kita ringkaskan gambaran-gambaran yang telah diuraikan dalam paragrap-paragrap sebelumnya mengenai keadaan di Aceh sebelam pecah peperangan dengan Jepang, makatidak lain dapat dilihat gerakan ke arah kemajuan dalam tempoh yag cepat. Memang benar masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan terutama dalam bidang politik masih banyak persoalan-persoalan yang memerlukan penyelesaian, tetapi segala-galanya itu rupa-rupanya memberi petunjuk, bahwa melalui jalan evolusi yang tenang keresidenan tersebut yang sebelumnya bersifat demikian istimewa telah dapat mencapai jarak yang jauh dalam perjalanannya yang masih panjang dan sulit menuju perkembangan untuk menjadi suatu keresidenan yang normal. Banyak hal yang oleh seorang pengamat dangkal dianggap sebagai "keistimewaan", adalah seperti yang telah saya usahakan membuktikannya di atas, dalam kenyataannya tidak lain dari pada suatu pengetrapan kebijaksanaan pemerintah kepada sifat khusus masyarakat Aceh dan rakyat Aceh, yang sekali_kali ti-

=dak=

dak mau untuk diabaikan dan tetap ikut memperhitungkan kebijaksanaan yang arif, meskipun ini menuju kepada "keadaan yang istimewa". Suatu hubungan kerjasama yang dipaksakan dalam hal ini akan banyak mengganggu hal2 yang telah dibangun dengan susah payah. Kecenderungan ke arah ini terdapat di tahun-tahun terakhir. Pengetrapan yang ketat peraturan-peraturan pelaksanaan dari pada undang_undang swapraja yang terbaru tidak cukup memperhitungkan hubungan-hubungan yang khusus Aceh itu. Ikut-sertanya pemerintah daerah di Medan, yang tidak memiliki bahan-bahan arsip yang diperlukan guna mempertimbangkan persoalan-persoalan Aceh yang spesifik itu, juga tidak tersedianya atau dapat disediakannya bahan-bahan mengenai tradisi Aceh dalam arti kata yang baik di departemen, kerap kali menyebabkan kesulitan-kesultan Aceh yang khusus itu tidak cukup dapat dipahami atau baru dalam waktu yang lama dapat cukup dipahami.

Saya sadar, bahwa gambaran yang telah saya berikan dalam paragrap2 tersebut di atas sama sekali tidak lengkap, tetapi saya telah berusaha setidak-tidaknya untuk mengemukakan semua unsur-unsur itu, yang dapat dipandang penting bagi pemahaman yang baik mengenai perkembangan lebih lanjut dari peristiwa2 selama dan juga sesudah pendudukan Jepang. Kita harus tetap memperhatikan di sini, bahwa banyak yang telah dikemukakan di atas ini, terutama yang mengenai latar belakang aliran2 politik dan agama, baru saat ini dapat disusun kembali dalam kaitan dengan peristiwa2 lebih lanjut dan bahwa banyak perkembangan2 yang pada saat ini dapat dianalisa dengan mudah, pada masa itu sedikitpun tidak sedemikian mudah dapat dikenal.

Bilamana di dalam uraian tersebut di atas ada juga beberapa hal yang telah ditinjau sedikit banyak secara kritis, maka itu sedikitpun tidak dimaksudkan untuk menyalahkan instansi-instansi atau orang-orang tertentu. Yang diinginkan hanyalah, agar dengan suatu penguraian yang sedapat mungkin demikian teliti terhadap keadaan2, seperti yang terdapat pada saat mulai pecahnya peperangan dengan Jepang, dapat memperdalam pemahaman mengenai jalannya peristiwa2 pada saat penyerbuan Jepang dan tahun2 pendudukannya yang menyusul kemudian. Hanya atas dasar ini akan di-

=peroleh=

peroleh kemungkinan untuk memahami keadaan di Aceh, sebagaimana halnya telah berkembang sesudah masa kapitulasi Jepang dan seperti telah terlihat kepada kita sejak saat itu.